

SKRIPSI

**ANALISIS PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN
INFRASTRUKTUR TERHADAP PEMBANGUNAN
EKONOMI INKLUSIF DI INDONESIA**



Disusun Oleh :

**Afra Yuni
NIM. 180604028**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Afra Yuni
NIM : 180604028
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Desember 2022

Yang Menyatakan,



Afra Yuni

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisis Penanaman Modal Dalam Negeri dan Infrastruktur
Terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif
di Indonesia**

Disusun Oleh :

Afra Yuni
NIM. 180604028

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Pembimbing I

Pembimbing II



Jariah Abu Bakar, SE., M.Si
NIP. 197508282005012001

A. Rahmat Adi, SE., M.Si
NIDN. 2025027902

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi,



Cut Dian Fitri, SE., M.Si, Ak.
NIP. 198307092014032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Afra Yuni
NIM : 180604028
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Illmu Ekonomi
E-mail : 180604028@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi (*tulis jenis ilmiah*) yang berjudul:

**Analisis Penanaman Modal Dalam Negeri dan Infrastruktur Terhadap
Pembangunan Ekonomi Inklusif Di Indonesia**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendisminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya,

Dibuat di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 21 Desember 2022

Mengetahui,

Penulis,

Afra Yuni

NIM. 180604028

Pembimbing I,

Jarrah Abu Bakar, SE., M.Si

NIP. 197508282005012001

Pembimbing II,

A. Rahmad Adi., SE., M.Si

NIDN. 2025027902

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan berkat Rahmat, dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ***“Analisis Penanaman Modal Dalam Negeri dan Infrastruktur terhadap pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia”***. Shalawat serta salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kehidupan manusia lebih bermakna dan berilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata-1 di Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam penulisan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. DR. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry
2. Cut Dian Fitri, SE., M.Si, Ak selaku ketua Program Studi Ilmu Ekonomi, dan Ana Fitria, SE., M.Sc, RSA selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi
3. Hafizh Maulana, SP, SHI, ME. selaku ketua Lab Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
4. Jariah Abu Bakar, SE., M.Si sebagai dosen pembimbing I, dan A.

- Rahmat Adi, SE.,M.Si. sebagai pembimbing II saya yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan ilmu pengetahuan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Dr. Muhammad Adnan, S.E., M.Si selaku penguji I, dan Jalilah, S.HI.,M.Ag. selaku penguji II yang telah memberikan masukan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
 6. Cut Elfida, S.HI.,MA Selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan saran dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, dan seluruh staf pengajar dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 7. Terima kasih Ayahnda dan Ibunda tercinta, beserta kakak-kakak dan keluarga tercinta yang telah memberikan kasih sayang serta do'a, arahan, dukungan, dan motivasi sehingga penulis bersemangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.
 8. Terima kasih penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat Suci Maqfirah SE, Riyangna Putroe Amd.Kep, Naziratur Rahmi dan Dila Masyitah dimana telah memberikan dukungan besar serta semangat yang tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan baik.
 9. Terima kasih kepada pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, tetapi telah memberikan inspirasi, doa dan motivasi bagi peneliti, semoga segala doa, bantuan, motivasi, saran dan arahan yang diberikan dapat menjadi amalan baik sehingga memperoleh balasan baik dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran agar skripsi ini menjadi lebih baik dan bermanfaat. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Banda Aceh, 09 Agustus 2022

Penulis,

Afra Yuni



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor:0543 b/u/1987

a. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

b. Vocal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vocal Tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vocal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau-la*

c. Maddah

Maddah atau panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ/يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ/يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

d. Ta Marbutah(ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah*(ة) hidup

Ta *marbutah*(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah*(ة) mati

Ta *marbutah*(ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudin Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Afra Yuni
NIM : 180604028
Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam/Ilmu Ekonomi
Judul : Analisis Penanaman Modal Dalam Negeri dan Infrastruktur terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia
Pembimbing I : Jariah Abu Bakar, SE., M.Si
Pembimbing II : A. Rahmat Adi, SE., M.Si

Pembangunan ekonomi inklusif sebagai komponen yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi secara merata yang diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan, kesenjangan dan pengangguran. Melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Infrastruktur (jalan, listrik dan telepon seluler) dalam menjalankan aktivitas ekonomi dapat menambah kesejahteraan masyarakat tanpa melihat latar belakang individu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Infrastruktur (jalan, listrik dan telepon seluler) terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Analisis data adalah analisis regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model*. Hasil dari penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Listrik dan Telepon Seluler berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia tahun 2016-2020. Sementara, PMDN berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia tahun 2016-2020. Serta secara simultan PMDN, Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Listrik dan Infrastruktur Telepon Seluler bersama-sama mempengaruhi Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia tahun 2016-2020.

Kata Kunci : *Pembangunan Ekonomi Inklusif, Penanaman Modal Dalam Negeri, Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Listrik dan Infrastruktur Telepon Seluler*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.5 Sistematika Penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
2.1 Pembangunan Ekonomi Inklusif	17
2.2 Penanaman Modal Dalam Negeri	22
2.3 Infrastruktur	27
2.3.1 Jalan	28
2.3.2 Listrik	39
2.3.3 Telepon Seluler	31
2.4 Hubungan Antar Variabel	34
2.4.1 Pengaruh PMDN Terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif	34
2.4.2 Pengaruh Infrastruktur Jalan Terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif.....	34
2.4.3 Pengaruh Infrastruktur Listrik Terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif.....	35

2.4.4 Pengaruh Infrastruktur Telepon Seluler Terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif	36
2.4 Penelitian Terkait	37
2.5 Kerangka Pemikiran	41
2.6 Hipotesis	41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	43
3.1 Jenis Penelitian	43
3.2 Populasi dan Sampel	43
3.3 Sumber Data	44
3.4 Definisi Operasionalisasi Variabel	45
3.5 Metode dan Analisis Data	46
3.5.1 Regresi Data Panel	46
3.5.2 Pengujian Model	48
3.7 Uji Hipotesis	50
3.7.1 Uji T	50
3.7.2 Uji F	50
3.7.3 Uji Koefisien Determinasi R^2	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 52	
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	52
4.2 Deskripsi Penelitian	54
4.2.1 Pembangunan Ekonomi Inklusif	56
4.2.2 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	58
4.2.3 Infrastruktur Jalan	60
4.2.4 Infrastruktur Listrik	62
4.2.5 Infrastruktur Telepon Seluler	64
4.3 Estimasi Regresi Data Panel	66
4.3.1 Uji Chow	67
4.3.2 Uji Hausman	68
4.4 Model Regresi Panel <i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	69
4.5 Uji T	71
4.6 Uji F	73
4.7 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	74
4.8 Pembahasan Penelitian	75

4.8.1 Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia	75
4.8.2 Pengaruh Infrastruktur Jalan Terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia	76
4.8.3 Pengaruh Infrastruktur Listrik Terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia	78
4.8.4 Pengaruh Infrastruktur Telepon Seluler Terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia	79
4.8.5 Pengaruh Secara Simultan Penanaman Modal Dalam Negeri, Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Listrik dan Infrastruktur Telepon Seluler Terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia	81
BAB V PENUTUP	82
5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRA	90
BIODATA PENULIS	107

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia, Tahun 2011-2021	2
Tabel 1.2 Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Luar Negeri di Indonesia Tahun 2013-2021	5
Tabel 1.3 Pertumbuhan Infrastruktur Panjang Jalan, Persentase Pengguna Listrik, dan Persentase Pengguna Telepon Seluler di Indonesia, Periode 2016-2020	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	38
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel	45
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk 34 Provinsi di Indonesia	53
Tabel 4.2 Pembangunan Ekonomi Inklusif, PMDN, Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Listrik dan Infrastruktur Telepon Seluler di Indonesia Tahun 2016-2020	55
Tabel 4.3 Hasil Chow Test	67
Tabel 4.4 Hasil Uji Hausman	68
Tabel 4.5 Hasil Fixed Effect Model	69
Tabel 4.6 Hasil Uji T	72
Tabel 4.7 Hasil Uji F	73
Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	74

A R - R A N I R Y

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Indonesia, Tahun 2011-2021	3
Gambar 1.2 Pertumbuhan Penanaman Modal, Tahun 2013- 2021	6
Gambar 1.3 Panjang Jalan (%) di Indonesia Tahun 2016-2020	9
Gambar 1.4 Persentase Pengguna Listrik dan Telepon Seluler di Indonesia, Tahun 2016-2020	9
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	41
Gambar 4.1 Peta Indonesia	52
Gambar 4.2 Grafik Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi-Provinsi di Indonesia Tahun 2016 s/d 2020 (Indeks)	57
Gambar 4.3 Grafik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi-Provinsi di Indonesia Tahun 2016 s/d 2020 Milyar Rupiah)	59
Gambar 4.4 Grafik Infrastruktur Jalan Provinsi-Provinsi di Indonesia Tahun 2016 s/d 2020 (%)	61
Gambar 4.5 Grafik Infrastruktur Listrik Provinsi-Provinsi di Indonesia Tahun 2016 s/d 2020 (%)	63
Gambar 4.6 Grafik Infrastruktur Telepon Seluler Provinsi - Provinsi di Indonesia Tahun 2016 s/d 2020 (%)	65

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Data Penanaman Modal Dalam Negeri, Infrastruktur Jalan Infrastruktur Listrik, Infrastruktur Telepon Seluler, Pembangunan Ekonomi Inklusif Tahun 2016-2020	90
Lampiran 2 Data Penanaman Modal Dalam Negeri Setelah Di Ln	96
Lampiran 3 Hasil Uji <i>Commont Effect Model</i>	102
Lampiran 4 Hasil Uji <i>Fixed Effect Model</i>	103
Lampiran 5 Hasi Uji <i>Random Effect Model</i>	104
Lampiran 6 Hasil Uji <i>Chow</i>	105
Lampiran 7 Hasil Uji <i>Hausman</i>	108



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia yang adil dan makmur, maka kehadiran negara dibutuhkan untuk melakukan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah segala aktivitas pembangunan berkelanjutan dan memuat seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Rangkaian aktivitas pembangunan nasional meliputi seluruh aktivitas pembangunan yang berlangsung secara terus menerus sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat antar generasi (Maryam dan Irwan, 2022).

Pembangunan ekonomi, pada mulanya hanyalah suatu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Realitasnya, pada tahun 1960 sampai 1970-an, pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai oleh sejumlah negara berkembang tidak mampu diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan, kesenjangan, dan pengangguran bahkan lebih buruk. Fakta tersebut mendorong perubahan arah pembangunan, dimana pembangunan ekonomi lebih berfokus pada kualitas dari pertumbuhan ekonomi.

Klasen (2010) mendefinisikan pembangunan inklusif adalah pembangunan dan pertumbuhan yang menghendaki adanya partisipasi dari semua pihak agar secara adil berperan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, sehingga

ketika perekonomian tumbuh, maka akan diikuti oleh penurunan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran.

Pertumbuhan yang inklusif adalah pertumbuhan ekonomi yang difokuskan pada upaya menciptakan peluang ekonomi dan memastikan peluangnya diakses oleh semua pihak tanpa memandang latar belakang pihak-pihak yang terlibat. Pertumbuhan inklusif, seharusnya inheren berkelanjutan mengurangi perbedaan mendasar antara orang mampu dan tidak mampu. Pertumbuhan inklusif memberikan peluang supaya semua orang berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Bappenas (2014) menyatakan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan.

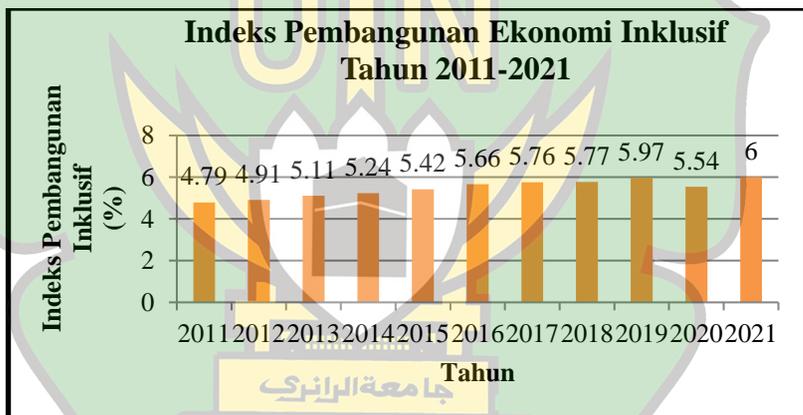
Tabel 1.1
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia, Tahun 2011 – 2021

Tahun	IPEI
2011	4,79
2012	4,91
2013	5,11
2014	5,24
2015	5,42
2016	5,66
2017	5,76
2018	5,77
2019	5,97
2020	5,54
2021	6,00

Sumber : Bappenas (2022)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa indeks pembangunan ekonomi inklusif selama periode 2011-2021 berada pada kisaran angka 4,79 sampai 6,00 atau termasuk kategori memuaskan (menurut skala kepuasan pembangunan ekonomi inklusif yang ditetapkan oleh Bappenas). Secara lebih jelas pergerakan angka indeks pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia selama periode 2011-2021 dapat dilihat dari grafik di bawah ini :

Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Indonesia, Tahun 2011-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Data Diolah (2022)

Selama kurun waktu 2011 sampai 2019, Indeks pembangunan ekonomi inklusif menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, tetapi memasuki tahun 2020 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif menunjukkan penurunan dari 5,97 pada tahun 2019 menjadi 5,54 pada tahun 2020 atau terjadi penurunan sebesar 0,43. Pada periode tersebut, penurunan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif disebabkan oleh adanya wabah pandemi Covid-19

yang mengakibatkan kontraksi. Hal ini dapat dilihat berdasarkan indeks pilar pertumbuhan dan perkembangan perekonomian pada tahun 2020 yang menurun drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2021 indeks pembangunan ekonomi inklusif kembali meningkat seiring dengan adanya pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian serta perluasan akses dan kesempatan.

Salah satu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi inklusif adalah adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kegiatan ekonomi ataupun upaya untuk memenuhi konsumsi masyarakat sehari-hari. Pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang tidak lepas dari investasi, sebagaimana dikemukakan oleh Tambunan (2016) bahwa, investasi merupakan salah satu faktor kelangsungan proses pembangunan ekonomi (*sustainable development*) atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang sangat krusial. Menurut Tan (2013), secara sederhana, investasi merupakan suatu proses aktivitas belanja pemerintah, swasta dan rumah tangga untuk memperoleh keuntungan.

Penanaman modal yang berasal dari dalam negeri atau disebut Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan penanaman modal yang berasal dari luar negeri disebut Penanaman Modal Luar Negeri (PMLN). PMDN dan PMLN sama-sama penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara (Dumairy, 2016). Perkembangan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

dan Penanaman Modal Luar Negeri (PMLN) di Indonesia dari tahun 2013-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Luar Negeri di Indonesia Tahun 2013-2021

Tahun	PMDN	PMLN
2021	447.063,60	446.030,52
2020	413.535,50	419.244,64
2019	386.498,40	398.618,55
2018	328.604,90	418.135,81
2017	262.350,50	431.948,84
2016	216.230,80	386.091,45
2015	179.465,90	393.995,06
2014	156.126,30	339.075,48
2013	128.150,60	302.286,65

Sumber : Badan Pusat Statistik diolah (2021)

Berdasarkan data BPS pada Tabel 2 dapat dijelaskan dilihat bahwa laju investasi PMDN selama periode 2013-2021 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sedangkan laju investasi PMLN mengalami fluktuasi. Setelah tahun 2020 investasi PMLN mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Secara lebih jelasnya, pertumbuhan investasi dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 1.2 Pertumbuhan Penanaman Modal, Tahun 2013-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Data Diolah (2022)

Berdasarkan grafik di atas, selama tahun 2013-2018, investasi PMDN terus meningkat sebagai respon terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Peran investasi dalam perekonomian nasional dapat dilihat juga melalui realisasi penyerapan tenaga kerja.

Peran penanaman modal terhadap pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme peningkatan penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri akan meningkatkan investasi yang akan mendorong kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat maka hal tersebut akan mendorong peningkatan konsumsi dan tabungan yang dilakukan oleh masyarakat. Selanjutnya, peningkatan tabungan masyarakat akan mendorong kenaikan investasi karena distimulus oleh bunga bank yang rendah sehingga pengusaha akan

menginvestasikan modalnya ke sektor ekonomi. Dengan adanya faktor tersebut, diharapkan dapat membangkitkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pemerintah Indonesia periode tahun 2020–2024 semakin menggenjot pembangunan infrastruktur karena infrastruktur merupakan pondasi bagi negara Indonesia untuk berkompetisi dengan negara lain. Pembangunan infrastruktur diarahkan agar infrastruktur besar dapat terkoneksi secara baik dengan kawasan-kawasan produksi rakyat, kawasan industri kecil, kawasan ekonomi khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan yang tersebar di wilayah-wilayah yang berbeda.

Infrastruktur ekonomi mengukur seberapa jauh masyarakat luas dapat mengakses pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya berfokus pada angka pendapatan yang tinggi, melainkan juga pada pembangunan infrastruktur yang mendukung kelancaran tercapainya target pembangunan ekonomi inklusif, yaitu pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung dan memperluas akses masyarakat untuk ikut adil dalam proses pembangunan dan merasakan manfaat dari tingginya pertumbuhan ekonomi yang telah tercapai.

Infrastruktur memiliki peran yang sangat penting dalam upaya meningkatkan investasi dan memperbesar daya jangkauan untuk partisipasi masyarakat dan pemerataan hasil pembangunan. Hapsari (2011) mendefinisikan infrastruktur sebagai sarana dan prasarana

yang menjadi fasilitas publik. Secara luas, sarana didefinisikan sebagai fasilitas publik yang meliputi jalan, rumah sakit, jembatan, air, telepon, tenaga listrik, dan lain-lain. Infrastruktur dalam ilmu ekonomi merupakan bentuk modal publik yang dihasilkan melalui investasi oleh pemerintah. Data pertumbuhan infrastruktur jalan, pengguna listrik, dan pengguna telepon seluler di Indonesia selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Pertumbuhan Infrastruktur Panjang Jalan, Persentase Pengguna Listrik, dan Persentase Pengguna Telepon Seluler di Indonesia, Periode 2016-2020

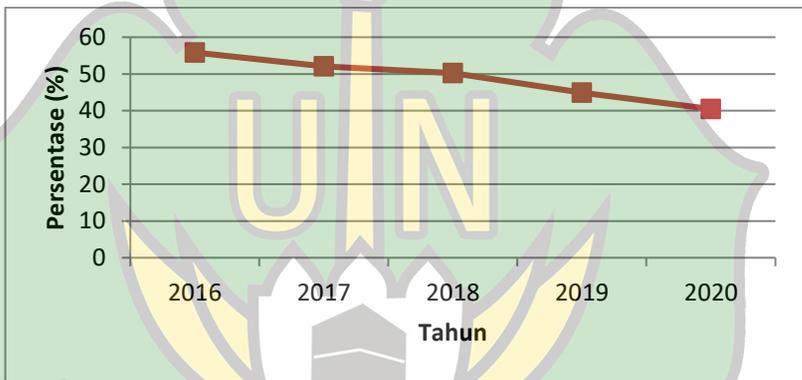
Tahun	Jenis Infrastruktur		
	Panjang Jalan (%)	Pengguna Listrik (%)	Pengguna Telepon Seluler (%)
2016	55,84	97,62	58,30
2017	52,08	98,14	59,59
2018	50,26	98,51	62,41
2019	44,89	98,85	63,53
2020	40,46	96,95	62,84

Sumber : Badan Pusat Statistik diolah (2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan dengan kondisi baik selama tahun 2016-2020 menunjukkan pertumbuhan yang negatif, dimana panjang jalan yang berkondisi baik di Indonesia semakin menurun setiap tahunnya. Sebaliknya, pengguna listrik menunjukkan

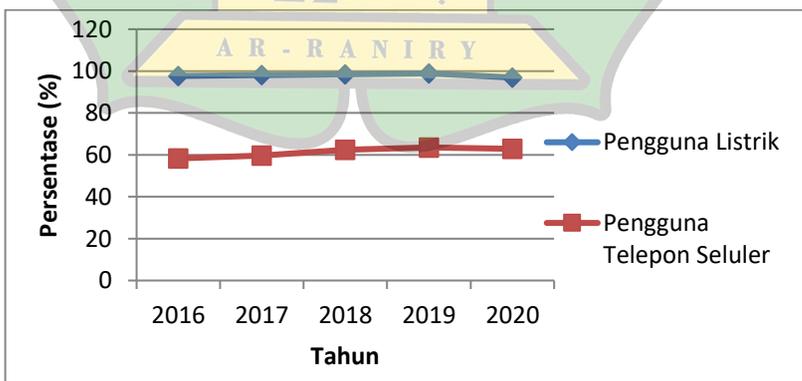
pertumbuhan positif. Kemudian, pertumbuhan pengguna telepon seluler menunjukkan pertumbuhan positif selama kurun waktu 2016-2020, tetapi pada tahun 2019-2020 pertumbuhan negatif. Secara lebih riil, untuk menggambarkan pertumbuhan pembangunan infrastruktur jalan, pengguna listrik, dan pengguna telepon seluler dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 1.3 Panjang Jalan (%) di Indonesia Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Data Diolah (2022)

Gambar 1.4 Persentase Pengguna Listrik dan Telepon Seluler di Indonesia, Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Data Diolah (2022)

Berdasarkan Gambar 1.3 di atas dapat dijelaskan bahwa panjang jalan dengan kondisi baik selama tahun 2016-2020 mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena penggunaan jalan yang digunakan untuk angkutan barang melebihi kapasitas yang tidak sesuai dengan kemampuan jalan, akibatnya banyak jalan yang rusak begitu parah. Gambar 5 menunjukkan pengguna listrik dan telepon seluler selama kurun waktu 2016-2020 mengalami pertumbuhan positif walaupun dengan laju yang kecil. Khusus pengguna telepon seluler pada tahun 2020 mengalami penurunan disebabkan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan ekonomi (PPKM) selama masa pandemi Covid-19 sehingga menurunkan daya beli masyarakat dan berdampak terhadap penurunan persentase pengguna telepon seluler. Pembangunan infrastruktur jalan, listrik dan telepon akan meningkatkan aktivitas ekonomi sektor riil, penyerapan tenaga kerja, meningkatkan konsumsi masyarakat dan belanja pemerintah, serta mendorong kegiatan produktif yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Energi listrik sangat penting penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di era modern seperti saat ini lebih banyak digunakan alat-alat penunjang kebutuhan dengan tenaga listrik sebagai sumber energinya. Energi listrik merupakan kebutuhan pokok yang digunakan oleh kelompok utama pengguna listrik, yaitu kelompok rumah tangga, industri, bisnis, dan umum. Artinya, energi listrik diperlukan sebagai penggerak kegiatan ekonomi, baik sektor rumah tangga, industri, bisnis, dan umum.

Bahkan, menurut Saril (2019) penggunaan listrik oleh sektor industri (antara lain industri besi baja, pengolahan kimia dan pengolahan makanan) memiliki efek domino yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Penggunaan listrik oleh sektor industri dapat meningkatkan produksi agregat, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Semakin besar penggunaan listrik akan meningkatkan aktivitas ekonomi dan pada akhirnya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Infrastruktur jalan berperan dalam menciptakan dan memperbaiki kehidupan masyarakat agar lebih sejahtera melalui kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi. Jalan merupakan prasarana utama bagi kelancaran transportasi melalui darat. Jalan yang tersedia dengan baik digunakan sebagai prasarana bagi kelancaran mobilitas faktor produksi dan hasil produksi dari suatu wilayah ke wilayah lain sehingga mendorong perkembangan perekonomian. Konteks yang lebih luas, pembangunan infrastruktur jalan dapat meningkatkan mobilitas penduduk, menurunkan biaya ekspedisi, sumber daya alam terdistribusi, terciptanya jasa angkutan sehingga meningkatkan aktivitas ekonomi dan produktivitas penduduk yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Era informasi dan teknologi yang semakin berkembang, penggunaan telepon seluler sudah menjadi kebutuhan sehingga tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Kebutuhan mutlak masyarakat akan informasi yang memadai meliputi kapasitas, kualitas, akses, dan jangkauan, dimana hal tersebut dapat

dipenuhi melalui penggunaan telepon seluler. Saat ini, telepon seluler selain digunakan sebagai sarana komunikasi dan informasi juga digunakan sebagai sarana untuk aktivitas sosial ekonomi seperti media sosial, bisnis *online*, dan media *online*. Berdasarkan hal tersebut sudah jelas penggunaan telepon seluler merupakan salah satu jenis sarana untuk memperoleh informasi yang bernilai ekonomi, kemampuan untuk memperoleh, menggunakan, dan mengolah informasi mutlak dimiliki untuk memicu pertumbuhan ekonomi.

Menurut Canning dan Pedroni (2014) bahwa tersedianya infrastruktur sangat penting pengaruhnya dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Infrastruktur merupakan roda penggerak bagi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan alokasi pembiayaan publik dan swasta dalam pembangunan nasional maka dapat dikatakan infrastruktur sebagai lokomotifnya. Infrastruktur memiliki peran sangat penting dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yaitu melalui nilai konsumsi yang meningkat, semakin luasnya akses lapangan kerja, meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan kemakmuran meningkat secara nyata.

Hasil kajian Sibrani (2013) membuktikan bahwa infrastruktur listrik dan pendidikan memberikan pengaruh positif dan signifikan, sedangkan variabel jalan dan telepon tidak signifikan terhadap pendapatan per kapita masyarakat Indonesia. Kemudian, Prasetyo dan Firdaus (2013) mengatakan bahwa ketersediaan infrastruktur, berupa elektrifikasi, jalan aspal, dan air bersih

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Demikian pula, Yanuar (2016) menemukan bahwa output perekonomian dipengaruhi secara signifikan dan linear oleh ketersediaan modal fisik, infrastruktur jalan, telepon, kesehatan, dan pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas belum diketahui seberapa besar kontribusi penanaman modal dalam negeri dan infrastruktur terhadap pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia. Penulis memandang perlu dilakukan suatu penelitian dan untuk kepentingan tersebut diangkat judul penelitian **“Analisis Penanaman Modal Dalam Negeri dan Infrastruktur terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif Di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia ?
2. Bagaimana Pengaruh Panjang Jalan terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia?
3. Bagaimana Pengaruh Listrik terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia?
4. Bagaimana Pengaruh Telepon Seluler terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia ?

5. Bagaimana Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Panjang Jalan, Listrik dan Telepon Seluler secara bersama-sama terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia.
2. Pengaruh Panjang Jalan terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia.
3. Pengaruh Listrik terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia.
4. Pengaruh Telepon Seluler terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia.
5. Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Panjang Jalan, Listrik dan Telepon Seluler secara bersama-sama terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kontribusi sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber informasi tentang penanaman modal dalam negeri dan infrastruktur serta keterkaitannya dengan pembangunan ekonomi inklusif.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi akademisi atau mahasiswa, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi tentang pengaruh penanaman modal dalam negeri terhadap pembangunan ekonomi inklusif.
- b. Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- c. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan agar penanaman modal dalam negeri dan infrastruktur dapat meningkatkan pembangunan ekonomi inklusif.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang latar belakang mengenai pengaruh penanaman modal dalam negeri dan infrastruktur terhadap pembangunan ekonomi inklusif. Pada bab satu berisi rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian sesuai rumusan masalah yang dikemukakan, manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian, dan tentang sistematika pembahasan hasil penelitian.

Bab II : Landasan Teoritis

Bab Landasan Teoritis merupakan kumpulan dari berbagai landasan teori sebagai dasar referensi oleh peneliti untuk keperluan penelitian. Pada bab ini berisi teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian, penelitian terdahulu yang menjadi dasar pengembangan bagi penelitian ini, kerangka pemikiran dan hipotesis.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian yang akan dilaksanakan, menetapkan populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, definisi dan operasionalisasi variabel, dan teknik analisis data.

Bab IV: Pembahasan

Pada bab ini mendeskripsikan hasil analisis data, pembahasan berdasarkan hasil analisis data dan teori yang menjadi referensi, serta pembuktian hipotesis.

Bab V : Penutup

Bab Penutup merupakan kesimpulan yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan peneliti. Bab Penutup juga berisikan-saran terkait dengan hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pembangunan Ekonomi Inklusif

Konsep pertumbuhan inklusif berawal dari fakta bahwa pertumbuhan ekonomi negara Asia yang tinggi justru diikuti peningkatan ketimpangan pendapatan (Klasen, 2010). Fenomena tersebut terjadi di negara-negara berkembang di Asia pada tahun 1960-an yang menegaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan. Akibat dari ketimpangan tersebut adalah menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang sesungguhnya bertentangan dari tujuan awal pembangunan ekonomi negara. Negara-negara berkembang, pada periode waktu tersebut, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi gagal menekan angka ketimpangan (Todaro dan Smith, 2015).

Pertumbuhan ekonomi yang masih diiringi dengan peningkatan ketimpangan menunjukkan bahwa pertumbuhan tersebut belum dinikmati oleh seluruh masyarakat. Fenomena tersebut mendorong arah kebijakan yang tidak hanya sekedar mengejar angka pertumbuhan, tetapi mampu menekan angka kemiskinan dan ketimpangan. Konsep tersebut dikenal dengan nama pertumbuhan ekonomi inklusif. Konsep pertumbuhan ekonomi inklusif menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus dapat meningkatkan kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati

dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara luas dan merata (Prasetyia, 2021).

International Disability and Development Consortium (IDDC) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi inklusif sebuah proses yang menjamin keterlibatan penuh dari semua kelompok masyarakat marginal di dalam pembangunan. Suatu pembangunan dikatakan inklusif apabila seluruh anggota komunitas terlibat dan berpartisipasi secara merata terhadap proses tersebut tanpa melihat kondisi dan latar belakang pribadi (Maryam dan Irwan, 2022). Pembangunan inklusif adalah pembangunan untuk seluruh masyarakat dengan tidak memandang perbedaan-perbedaan yang dimilikinya (Prasetyanyoko, et al, 2012).

Prasetyo dan Firdaus (2013) dalam Panjaitan, Mulatsih dan Rindayati (2019) mendefinisikan pembangunan ekonomi inklusif sebagai pertumbuhan yang menciptakan peluang ekonomi baru dan adanya jaminan aksesibilitas yang merata untuk semua segmen masyarakat terutama dari kelompok marginal.

Pembangunan inklusif merupakan komponen utama dari pembangunan ekonomi berkelanjutan sesuai kesepakatan global tentang *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu pembangunan ekonomi yang merata, penurunan kemiskinan dan pengangguran, serta menjadi stimulus bagi pembangunan ekonomi yang lebih cepat. Keempat indikator tersebut dimaknai sebagai pertumbuhan ekonomi yang dapat mengurangi kemiskinan,

ketimpangan pendapatan antar individu, dan tingkat pengangguran (Ianchovichina dan Gable, 2012 dalam Panjaitan et al, 2019).

Hasil kajian Warsilah (2015) tentang pembangunan ekonomi inklusif menunjukkan bahwa konsep pembangunan inklusif merupakan penerapan pendekatan pembangunan yang berfokus pada aspek sosial dan menjadi solusi untuk mereduksi kesenjangan sosial akibat kesalahan pengelolaan pembangunan yang hanya berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Melalui hasil penelitian Warsilah disimpulkan bahwa pendekatan pembangunan inklusif di kota Solo mampu mengurangi terjadinya kesenjangan sosial dan menjadi stimulan inklusi sosial dengan melibatkan warga kota Solo untuk berperan aktif dalam proses pembangunan.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui apakah pembangunan ekonomi tergolong inklusif atau tidak inklusif dapat diketahui dari nilai Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif. Jadi, Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tingkat inklusivitas pembangunan ekonomi baik pada tingkat nasional maupun regional. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bappenas (2019) bahwa Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan.

Menurut Widyasanti (2019), angka Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif terdiri dari 3 pilar dan 8 Sub-pilar serta 21 indikator, yaitu:

1. Pilar I yaitu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi

Pilar pertumbuhan dan perkembangan ekonomi terdiri dari 3 sub pilar yaitu:

(1) Pertumbuhan ekonomi dengan 3 indikator; yaitu pertumbuhan PDRB riil per kapita, *share* sektor manufaktur terhadap PDRB, dan resiko kredit perbankan terhadap PDRB nominal.

(2) Kesempatan kerja dengan 3 indikator, yaitu: tingkat kesempatan kerja, persentase penduduk bekerja dengan jam kerja ≥ 35 jam per minggu, dan persentase tenaga kerja dengan tingkat pendidikan menengah ke atas.

(3) Infrastruktur ekonomi dengan 3 indikator, yaitu: persentase rumah tangga yang menggunakan listrik/PLN, persentase penduduk yang memiliki/menguasai telepon genggam, dan total jalan dengan kondisi baik dan sedang/luas wilayah.

2. Pilar II yaitu Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan, terdiri dari

2 sub pilar yaitu:

(1) Ketimpangan dengan 3 indikator, yaitu : rasio gini, sumbangan pendapatan perempuan, dan rasio rata-rata pengeluaran rumah tangga desa dan kota.

(2) Kemiskinan dengan 2 indikator, yaitu: persentase penduduk miskin, rata-rata konsumsi protein per kapita per hari.

3. Pilar III yaitu Perluasan Akses dan Kesempatan, terdiri dari 3 sub pilar yaitu:

- (1) Kapabilitas manusia dengan 3 indikator, yaitu: harapan lama sekolah, persentase balita yang mendapat imunisasi dasar lengkap, dan persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan.
- (2) Infrastruktur dasar dengan 2 indikator, yaitu: persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak, persentase rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air besar sendiri.
- (3) Keuangan inklusif dengan 2 indikator, yaitu: rasio jumlah rekening DPK dibagi dengan jumlah penduduk usia produktif, dan rasio jumlah rekening kredit perbankan UMKM terhadap rekening kredit secara keseluruhan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dapat dihitung dengan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif memuat tiga pilar utama yaitu pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan perluasan akses dan kesempatan. Kriteria Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif yaitu:

1. Angka 1 – 3 termasuk kategori tidak memuaskan.
2. Angka 4 – 7 termasuk kategori memuaskan.
3. Angka 8 - 10 termasuk kategori sangat memuaskan.

2.2. Penanaman Modal Dalam Negeri

Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan salah satu komponen dalam pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan pendapat Todaro (2015) bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebuah negara, antara lain adanya akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi. Aktivitas investasi akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara.

Harrod-Domar menyatakan investasi memberikan pengaruh ganda dalam jangka panjang, yakni mempengaruhi permintaan agregat dan kapasitas produksi nasional dengan penambahan stok modal. Harrod menyatakan *required growth = required savings ratio* dibagi oleh *required capital output ratio*. Sedangkan Domar membuat permodelan dimana *ekuilibrium* dalam pertumbuhan ekonomi sangat memerlukan pertumbuhan investasi dalam perkembangan waktu (Arsyad, 2010 dalam Seraphim, 2018).

Beberapa tahun terakhir ini, investasi merupakan penyumbang kedua terbesar pada Produk Domestik Bruto (PDB) setelah konsumsi rumah tangga. Peran investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dinyatakan melalui rumus sebagai berikut:

$$Y = C + I + G + (X-M)$$

Keterangan :

Y = Pendapatan nasional

C = Konsumsi

I = Investasi

G = Pengeluaran Pemerintah

X = Ekspor

M = Impor

Sutawijaya (2010) dalam Seraphim (2018) menyatakan bahwa investasi yang meningkat mendorong peningkatan produksi barang dan jasa yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sumber dana untuk investasi berasal dari para penanam modal sehingga diperlukan upaya menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya.

Berdasarkan statusnya, investasi meliputi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Zahara dan Oktavia, 2021).

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Bab I tentang Ketentuan Umum pada Pasal 1 disebutkan bahwa :

- a. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.

- b. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
- c. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
- d. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
- e. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Berdasarkan bunyi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 sudah dijelaskan disebutkan bahwa penanam modal dalam negeri adalah warga negara Indonesia baik perseorangan, badan usaha, negara maupun daerah-daerah di Indonesia yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Bidang usaha yang dapat menjadi sasaran PMDN adalah semua bidang usaha yang ada di Indonesia. Namun, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar penanaman modal dalam negeri dapat terealisasi, sebagai berikut:

- a. Permodalan, modal yang digunakan merupakan kekayaan masyarakat Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Pelaku investasi, Negara dan swasta. Pihak swasta dapat terdiri dari orang atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
- c. Bidang usaha, semua bidang yang terbuka bagi swasta, yang dibina, dipelopori atau dirintis oleh pemerintah.
- d. Perizinan dan perpajakan, memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
- e. Batas waktu berusaha, merujuk kepada peraturan dan kebijakan masing-masing daerah.
- f. Tenaga kerja, wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia, kecuali jabatan tertentu yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja Indonesia.

Berkaitan dengan bidang usaha PMDN, menurut Zahara dan Oktavia (2021), pada periode 2016-2020, PMDN merupakan penyumbang sektor industri makanan dan sektor listrik, gas dan air. Sedangkan pada kurun tahun 2018-2020 PMDN menjadi penyumbang terbesar sektor transportasi, gudang, telekomunikasi dan sektor konstruksi. Sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi mengalami peningkatan realisasi investasi yang cukup besar yaitu dari sebesar Rp26,65 triliun di tahun 2016 menjadi Rp93,28 triliun pada tahun 2020. Pada periode tahun 2019-2020, 5 sektor penyumbang PMDN terbesar berasal dari sektor transportasi,

gudang dan telekomunikasi; konstruksi; listrik, gas dan air; tanaman pangan, perkebunan dan peternakan; dan industri makanan.

Berkaitan dengan penanaman modal, menurut Indar parawansa (2021), upaya percepatan investasi perlu diupayakan melalui kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mempermudah perizinan, memfasilitasi investor, dan peningkatan kualitas UMKM baik produk, desain maupun manajemen.

Seraphim (2018) membuktikan bahwa penanaman modal dalam negeri memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada seluruh provinsi di Indonesia. Hal tersebut mengindikasikan bahwa apabila terjadi kenaikan PMDN maka akan mendorong kenaikan pada pertumbuhan ekonomi. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui mekanisme kenaikan pada PMDN akan mendorong peningkatan produksi barang dan jasa melalui peningkatan modal atau *capital* sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya jika terjadi penurunan PMDN maka akan memicu penurunan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari turunnya produksi barang dan jasa dalam perekonomian. Fakta ini didukung oleh pendapat Samuelson dan Nourdhaus (2004 dalam Seraphim, 2018) yang menyatakan bahwa investasi merupakan faktor penunjang penting dalam membangun perekonomian karena merupakan dasar dari proses produksi. Lebih lanjut, Seraphim (2018) meyakini bahwa pada kasus tertentu, tingkat inklusifitas

yang tinggi tidak dapat secara optimal dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan adanya hambatan seperti kondisi geografis antar wilayah dan lain sebagainya.

2.3. Infrastruktur

Infrastruktur didefinisikan sebagai kombinasi dari satu set struktur yang membentuk satu rangka dan dapat menyokong struktur tertentu yang lebih besar, seperti infrastruktur pengangkutan terdiri dari jalan raya, rel kereta api, lapangan terbang, pelabuhan dan komponen-komponen lainnya yang berkaitan dengan pengangkutan atau transportasi (World Bank, 1994 dalam Panjaitan et al, 2019).

Sistem infrastruktur merupakan segala fasilitas maupun berbagai struktur dasar, peralatan, dan instalasi yang dibangun serta dibutuhkan supaya sistem sosial dan ekonomi masyarakat dapat berfungsi (Grigg 1988 dalam Muhammad, 2004).

World Bank membagi infrastruktur ke dalam tiga sektor, yaitu:

- a. Infrastruktur ekonomi, yaitu infrastruktur fisik yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas ekonomi, terdiri dari *public utilities* (listrik, telekomunikasi, air, sanitasi, gas), *public work* (jalan, irigasi, kanal, drainase dan bendungan) dan sektor transportasi (jalan, rel, lapangan terbang, pelabuhan, dan lain-lain).
- b. Infrastruktur sosial, terdiri dari pendidikan, kesehatan, perumahan dan rekreasi.

- c. Infrastruktur administrasi, meliputi penegakan hukum, kontrol administrasi dan koordinasi (Panjaitan et al, 2019).

Lebih lanjut, pembangunan infrastruktur yang baik akan menjamin efisiensi, memperlancar pergerakan barang dan jasa, dan meningkatkan nilai tambah perekonomian (Prasetyo dan Firdaus, 2009). Pembangunan infrastruktur dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat yang diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan. Pembangunan infrastruktur merupakan syarat perlu untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan (Maryaningsih et al, 2014). Calderon dan Serven (2005) membuktikan bahwa infrastruktur memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi serta berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan.

2.3.1. Jalan

Jalan merupakan infrastruktur ekonomi berbentuk fisik berupa public work yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas ekonomi (Grigg dalam Muhammad, 2004). Ketersediaan infrastruktur jalan memperlancar akses sumber daya. Infrastruktur jalan berperan sangat penting sebagai penghubung unit-unit ekonomi antar wilayah. Infrastruktur jalan berfungsi dalam proses pendistribusian sumber-sumber perekonomian antar wilayah sehingga mengurangi kesenjangan dan sekaligus menciptakan pemerataan. Aktivitas ekonomi akan tumbuh di sepanjang jalur

distribusi sehingga menciptakan kesempatan ekonomi (Prasetyo dan Firdaus, 2013).

Infrastruktur jalan merupakan tempat bertumpunya perkembangan ekonomi, sehingga tanpa ketersediaan jalan yang memadai akan sulit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini sesuai dengan pendapat Tambunan (2005) yang menegaskan bahwa infrastruktur jalan memiliki manfaat ekonomi sangat tinggi apabila dibangun tepat sasaran yaitu guna melayani kebutuhan masyarakat dan dunia usaha yang berkembang.

Hasil penelitian Panjaitan et al (2019) menunjukkan bahwa semakin panjang jalan yang dibangun di Provinsi Sumatera Utara, maka peluang penduduk untuk bekerja semakin besar. Peningkatan panjang jalan sebesar 10 persen akan menciptakan peluang bekerja sebesar 0.038 persen (*ceteris paribus*). Penambahan panjang jalan dapat menurunkan ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Utara. Peningkatan panjang jalan sebesar 10 persen dapat menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar 0.070 persen. Hasil tersebut menguatkan pentingnya pembangunan jalan di Sumatera Utara bagi tercapainya pembangunan inklusif.

2.3.2. Listrik

Listrik merupakan infrastruktur sektor ekonomi fisik berupa public utilities yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas ekonomi (Grigg dalam Muhammad, 2004). Tenaga listrik sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat pada umumnya

dan dapat mendorong peningkatan kegiatan ekonomi pada khususnya. Kegiatan ekonomi selalu berkaitan dengan produksi dan konsumsi. Sebagian besar proses produksi dan konsumsi membutuhkan energi dan tenaga listrik. Implementasinya, setiap kegiatan pengembangan ekonomi yang umumnya berkaitan dengan pembangunan atau investasi, tersedianya tenaga listrik selalu menjadi syarat yang diminta oleh investor. Maka, bagi negara yang sedang berkembang, perekonomian tidak akan tumbuh jika jaminan energi dan pasokan tenaga listrik (*security of supply*) tidak tersedia (FGD UGM, 2016).

Listrik merupakan bagian dari infrastruktur yang berperan dalam menggerakkan perekonomian nasional. Listrik dapat mendorong tumbuhnya industri yang akan menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan output yang memiliki daya saing secara ekonomi, sosial dan budaya. Sebaliknya, tanpa listrik maka industri tidak tumbuh, lapangan kerja tidak tercipta, dan penghasilan masyarakat tidak bisa tinggi (Media Indonesia, 2022). Pemanfaatan energi listrik diharapkan dapat menjadi faktor pendorong ekonomi sekaligus faktor penarik aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan akan mendorong peningkatan pendapatan perkapita sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkat (FGD UGM, 2016).

Gibson dan Olivia (2013) membuktikan bahwa kualitas infrastruktur jalan dan listrik berpengaruh terhadap lapangan kerja dan pendapatan usaha non pertanian masyarakat pedesaan di

Indonesia. Pembangunan infrastruktur jalan, jaringan listrik, dan telepon seluler merupakan pembentuk struktur ruang nasional yang memiliki keterkaitan sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi maupun sosial budaya kehidupan masyarakat. Hapsari (2011) membuktikan bahwa variabel infrastruktur jalan dan listrik berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.3.3. Telepon Seluler

Telepon seluler merupakan salah satu jenis infrastruktur ekonomi fisik berupa public utilities yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas ekonomi (Grigg dalam Muhammad, 2004). Peran teknologi komunikasi saat ini menjadi sangat penting karena banyaknya tuntutan kebutuhan akan pertukaran informasi yang cepat dan tepat. Teknologi komunikasi yang berkembang saat ini telah memungkinkan manusia untuk terhubung satu sama lain tanpa dibatasi jarak, ruang, dan waktu. Penyatuan berbagai fungsi dari alat-alat komunikasi telah menyatu dalam sebuah alat komunikasi yang bernama telepon seluler atau *smartphone*. *Smartphone* merupakan telepon seluler dengan kemampuan lebih, mulai dari resolusi, fitur, hingga komputasi termasuk adanya sistem operasi mobile didalamnya (Daeng, Mewengkang, dan Kalesaran, 2017).

Telepon seluler merupakan salah satu bentuk teknologi informasi yang penggunaannya cukup tinggi di kalangan masyarakat. Kehadiran dari *smartphone* ini memang mampu memberi berbagai manfaat dan kemudahan bagi penggunanya. Hasil

survei Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) dengan LPEM Universitas Indonesia menunjukkan 84% responden menyatakan bahwa telepon seluler (*smartphone*) bukanlah barang mewah tetapi telah menjadi kebutuhan. Keputusan membeli *smartphone* bukan sekedar gaya hidup tetapi lebih kepada fungsinya. Penggunaan *smartphone* di Indonesia berkontribusi sebesar 5,5% terhadap perekonomian nasional yang berarti setiap kenaikan 1% pengguna telepon seluler (ponsel) meningkatkan PDB sebesar 0,055%. Secara nilai, kontribusi setiap pengguna *smartphone* terhadap nilai tambah ekonomi di Indonesia sebesar Rp1,73 juta per tahun (Kristiono, 2021).

Fasilitas-fasilitas yang terdapat dalam telepon seluler tidak hanya terbatas pada fungsi komunikasi saja. Telepon seluler dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran dimana melalui *smartphone* seseorang dapat mempelajari hal-hal baru melalui isi atau pesan yang disalurkan. Selain itu *smartphone* juga digunakan bagi sekelompok masyarakat sebagai salah satu ikon gaya hidup, yang menurut Kotler (2000) adalah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Jadi, *smartphone* juga bisa menjadi media hiburan sekaligus menyalurkan hobi seseorang seperti; bermain *game*, dan mendengarkan musik bahkan kita dapat bermain alat musik dengan menggunakan aplikasi-aplikasi pendukung. Selain itu, *smartphone* dapat menjadi sarana untuk menjalankan bisnis (bisnis yang berbasis *on-line*) dan dapat menjadi alat untuk menyimpan berbagai macam

data baik dalam bentuk huruf, angka, dan gambar (Daeng et al, 2017).

Pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) terhadap *smartphone* berpotensi menurunkannya aktivitas perekonomian di sektor perdagangan dan industri kreatif. Hal ini juga akan menurunkan produksi pada sektor teknologi, informasi dan komunikasi, yang berdampak pada ekosistem ekonomi digital. Dampaknya, penerimaan pajak dari sektor-sektor tersebut juga pada akhirnya menurun, dan berpotensi menimbulkan pengangguran. Rudiantara mengatakan hasil survei yang dilakukan LPEM UI dan Mastel membuktikan sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang didukung dengan *smartphone* telah membentuk perekonomian digital yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Sementara, Indonesia sendiri merupakan negara dengan potensi *digital economy* terbesar di dunia (Indotelko, 2021).

Hasil penelitian Lantera dan Purwanti (2021) menunjukkan bahwa dalam rentang waktu 2011 – 2019, teknologi informasi dan komunikasi khususnya perkembangan internet broadband dan telepon memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 9 negara yang tergabung dalam APEC. Penggunaan telepon seluler menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Perkembangan telepon seluler memiliki pengaruh yang tidak signifikan jika dibandingkan dengan variabel TIK lainnya dikarenakan tingkat penetrasi pengguna

telepon seluler di Kawasan Asia – Pasifik masih memiliki rata – rata yang rendah, tetapi secara keseluruhan pada rentang waktu 2011 – 2019 teori pertumbuhan endogen masih berlaku yang ditandai dengan pengaruh positif antara perkembangan teknologi dengan pertumbuhan ekonomi di 9 negara yang tergabung dalam APEC.

2.4. Hubungan Antar Variabel Kerangka Berfikir

2.4.1. Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif Di Indonesia

Pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak lepas dari investasi, penanaman modal merupakan langkah awal untuk melakukan pembangunan. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi diperlukan peningkatan penanaman modal dalam negeri dalam mengolah suatu potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi dengan menggunakan modal dalam negeri ataupun luar negeri (Danisa, 2019). Seraphim (2018) menyatakan bahwa pada kasus tertentu, tingkat inklusif yang tinggi dapat secara optimal dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan adanya hambatan seperti kondisi geografis antar wilayah dan lain sebagainya.

2.4.2. Pengaruh Infrastruktur Jalan Terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif Di Indonesia

Suatu pembangunan dilakukan pemerintah dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya pada ketersediaan infrastruktur. Infrastruktur sangat diperlukan di dalam

proses pertumbuhan ekonomi karena dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, sehingga menciptakan lapangan kerja baru, menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan perkapita. Pembangunan infrastruktur yang baik akan menjamin efisiensi, memperlancar pergerakan barang dan jasa, dan meningkatkan nilai tambah perekonomian (Prasetyo dan Firdaus 2009). Infrastruktur jalan merupakan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena dapat memudahkan segala akses aktivitas yang dilakukan masyarakat. Oleh karena itu infrastruktur jalan dapat membantu tingkat kesejahteraan pada masyarakat.

Calderon dan Serven (2005) membuktikan bahwa infrastruktur memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi serta berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan. Hasil penelitian Panjaitan et al (2019) yang menunjukkan bahwa secara persial pembangunan infrastruktur jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Inklusif.

2.4.3. Pengaruh Infrastruktur Listrik Terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif Di Indonesia

Infrastruktur listrik merupakan sumber energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia, energi listrik memegang peranan yang sangat dominan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Menurut Saril (2019) pengguna listrik oleh sektor industri memiliki efek domino yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Di era modern sekarang ini keberadaan listrik adalah kebutuhan yang

sangat penting untuk masyarakat umum karena disetiap kegiatan manusia saat ini adalah selalu menggunakan listrik. Peningkatan konsumsi energi listrik ini tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi. Hapsari (2011) membuktikan bahwa variabel infrastruktur jalan dan listrik berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.4.4. Pengaruh Infrastruktur Telepon Seluler Terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif Di Indonesia

Sarana telekomunikasi untuk telepon seluler merupakan infrastruktur yang cukup penting dan strategis. Telepon seluler merupakan salah satu jenis infrastruktur ekonomi fisik berupa public utilitas yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas ekonomi (Grigg dalam uhammad, 2004). Kebutuhan mutlak masyarakat akan informasi yang memadai meliputi kapasitas, kualitas, akses dan jangkauan, dimana hal tersebut dapat dipenuhi melalui penggunaan telepon seluler. *Smartphone* merupakan telepon seluler dengan kemampuan lebih, mulai dari resolusi, fitur, hingga komputasi termasuk adanya sistem operasi mobile didalamnya (Daeng, Mewengkang, dan Kalesaran, 2017). Hasil penelitian Kamila, Sasana & Sugiharti (2021) menunjukkan bahwa secara persial infrastruktur telepon seluler berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif.

2.5. Penelitian Terkait

Beberapa hasil penelitian terkait yang relevan dengan judul penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Rahmawati et al (2021)	Dampak Pandemic Covid-19 terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Jawa Timur Indikator Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan	Persamaan Variabel : Indeks Pembangunan ekonomii nklusif Perbedaan Variabel: Tingkat kemiskinan dan ketimpangan	Pandemi covid-19 berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Pandemi Virus Covid-19 menimbulkan dampak yang cukup signifikan di sektor perekonomian domestik & pada keberadaan UMKM di negara dan bangsa. Dampak dari Covid-19 yang sudah menyebabkan economic shock, juga sangat berpengaruh terhadap ekonomi, baik secara perorangan usaha mikro kecil menengah, perekonomian negara yang mencakup dari local, nasional serta global

Tabel 2.1 – Lanjutan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
2	Kamilla, Sasana dan Sugiharti (2021)	Pengaruh Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia Tahun 2012-2019	<p>Persamaan Variabel: Pertumbuhan Ekonomi Inklusif</p> <p>Perbedaan Variabel: Pengguna Internet, Pengeluaran Rumah Tangga</p>	Pengguna Internet, Pengguna Telepon Seluler dan pengeluaran rumah tangga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia.
3	Ramadhan dan Setiadi (2019)	Pengaruh Modal Fisik dan Sumber Daya Manusia terhadap Indeks Inklusif di Indonesia	<p>Persamaan Variabel: Pertumbuhan Ekonomi Inklusif</p> <p>Perbedaan Variabel: Belanja Modal, TPAK, Pengeluaran Pemerintah</p>	Belanja Modal, Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Indeks Inklusif. Sementara, Investasi Modal Swasta dan Pengeluaran Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Inklusif.
4	Panjaitan et al (2019)	Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Provinsi Sumatera Utara.	<p>Persamaan Variabel: Infrastruktur Pertumbuhan ekonomi inklusif</p> <p>Perbedaan Variabel: Kesempatan kerja, distribusi pendapatan</p>	Pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara mendorong pertumbuhan ekonomi, dimana infrastruktur jalan meningkatkan akses kesempatan kerja serta distribusi pendapatan yang lebih merata.

Tabel 2.1 – Lanjutan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
5	Hartati (2021)	Analisis Perumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia	<p>Persamaan Variabel: Pertumbuhan Ekonomi Inklusif</p> <p>Perbedaan Variabel: Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan, tingkat pengangguran terbuka</p>	Variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Sedangkan variabel tingkat pengangguran terbuka (TPT) berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif.
6	Fitrianasari, Chotimah dan Arnida (2022)	Analisis Dampak Kebijakan Makroekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2015-2020	<p>Persamaan Variabel : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif</p> <p>Perbedaan Variabel: Kebijakan Makroekonomi</p>	Persentase pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan, inflasi, keterbukaan ekonomi, dan pembentukan modal tetap bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif.
7	Ernawati dan Haical (2022)	Analisis Spasial Pertumbuhan Inklusif Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2015-2020	<p>Persamaan Variabel : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif</p> <p>Perbedaan Variabel: Pengeluaran Pemerintah dan Air Bersih</p>	Infrastruktur jalan, pengeluaran pemerintah, akses air bersih dan akses listrik berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif.

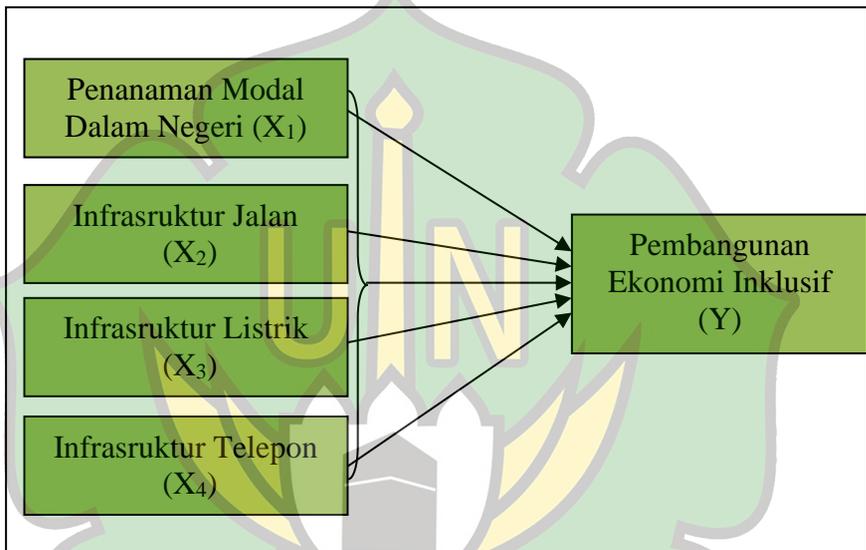
Tabel 2.1 – Lanjutan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
7	Ngatono (2016)	Pengaruh Infrastruktur Telekomunikasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Banten Tahun 2004-2013	Persamaan Infrastruktur Telekomunikasi Perbedaan Variabel: Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan telekomunikasi dan PDRB di provinsi Banten menunjukkan adanya hubungan yang signifikan, hal ini tunjukan dengan hasil penguji dengan metode determinasi R^2 yaitu sebesar 0,993
8	Ferdy dan Alpon (2022)	Pengaruh Infrastruktur Ekonomi, Sosial Dan <i>Foreign Direct Investment</i> Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	Persamaan Variabel : Infrastruktur Perbedaan Variabel: Pertumbuhan Ekonomi	Infrastruktur jalan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, infrastruktur listrik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, infrastruktur Telekomunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, infrastruktur Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, foreign direct investment berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia

2.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang penelitian, landasan teoritis dan penelitian terdahulu maka kerangka pemikiran penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.7 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang telah diajukan melalui data yang dikumpulkan. Adapun hipotesis yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. H_{01} : Diduga Penanaman Modal tidak berpengaruh terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia.
 H_{a1} : Diduga Penanaman Modal berpengaruh terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia.

2. H₀₂ : Diduga Panjang Jalan tidak berpengaruh terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia.
Ha₂ : Diduga Panjang Jalan berpengaruh terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia.
3. H₀₃ : Diduga Listrik tidak berpengaruh terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia.
Ha₃ : Diduga Listrik berpengaruh terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia.
4. H₀₄ : Diduga Telepon Seluler tidak berpengaruh terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia.
Ha₄ : Diduga Telepon Seluler berpengaruh terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia.
5. H₀₅ : Diduga Penanaman Modal Dalam Negeri, Panjang Jalan, Listrik, dan Telepon Seluler tidak berpengaruh secara bersama-sama terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia.
6. Ha₅ : Diduga Penanaman Modal Dalam Negeri, Panjang Jalan, Listrik, dan Telepon Seluler berpengaruh secara bersama-sama terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian empiris dimana data yang diperoleh dalam bentuk sesuatu yang dapat dihitung (angka). Metode deskriptif merupakan salah satu dari beragam metode penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mendalami atau menggambarkan tentang situasi sosial yang akan diteliti secara holistik, luas, serta *depth* (Bungin, 2017).

Metode penelitian kuantitatif deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan secara terstruktur dan mendetail dari fakta atau karakteristik suatu populasi berdasarkan fakta yang ada dan dilakukan secara cermat. Ruang lingkup penelitian ini dilakukan dengan menganalisis pengaruh penanaman modal dalam negeri dan infrastruktur terhadap pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia.

3.2 Populasi dan Sampel

Sugiyono (2014) mendefinisikan populasi merupakan wilayah generalisasi meliputi objek dan subjek yang memiliki mutu dan ciri untuk dipelajari dan diterik kesimpulan sesuai keinginan peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh provinsi di Indonesia yaitu sebanyak 34 provinsi. Seluruh populasi diambil

sebagai sampel penelitian (sampling jenuh) yaitu terdiri dari 34 provinsi.

3.3 Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Indriantoro (2009), data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti tetapi melalui media perantara. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah data Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di 34 Provinsi di Indonesia tahun 2016-2020 diperoleh dari Kementerian PPN/Bappenas. Data penanaman modal dalam negeri pada tahun 2016-2020 diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Kementerian Keuangan dan data realisasi belanja infrastruktur di 34 Provinsi di Indonesia pada tahun 2016-2020 diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Data sekunder juga diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti melalui media surat kabar online, jurnal dan beberapa penelitian sebelumnya.

3.4 Definisi Operasionalisasi Variabel

Definisi operasional variabel penelitian ini dapat dijabarkan dalam matriks sebagai berikut:

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Indikator
1	Pembangunan Ekonomi Inklusif (Y)	Data Pembangunan Ekonomi Inklusif adalah data tahun dari periode 2016-2020 yang bersumber dari Bappenas dinyatakan dengan angka Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif dengan satuan Indeks
2	Penanaman Modal Dalam Negeri (X ₁)	Data PMDN adalah data Realisasi PMDN dari tahun 2016-2020 yang bersumber dari BPS dinyatakan dalam Rp milyar
3	Jalan (X ₂)	Data Jalan merupakan data panjang jalan dalam kondisi baik dari tahun 2016-2020 yang bersumber dari BPS dinyatakan dalam persen (%)
4	Listrik (X ₃)	Data Listrik merupakan data pengguna listrik dari tahun 2016-2020 yang bersumber dari BPS dinyatakan dalam persen (%)
5	Telepon Seluler (X ₄)	Data Telepon Seluler merupakan data pengguna telepon seluler dari tahun 2016-2020 yang bersumber dari BPS dinyatakan dalam persen (%)

3.5. Metode dan Analisis Data

3.5.1. Regresi Data Panel

Penelitian ini melibatkan data yang bersifat *time series* (runtun waktu) dan *cross section* (lintas bagan). Sifat *time series* terlihat dari diambilnya kurun waktu 5 tahun dari tahun 2016-2020, sedangkan *cross section* terlihat dari data 34 provinsi yang dijadikan sebagai wilayah penelitian. Berdasarkan hal tersebut, maka analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode regresi data panel. Persamaan umum regresi data panel sebagai berikut:

$$PEI_{it} = \alpha + \beta_1 PMDN_{it} + \beta_2 JLN_{it} + \beta_3 LTK_{it} + \beta_4 TLP_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

PEI = Pembangunan Ekonomi Inklusif (Indeks)

α = Konstanta

$\beta_{i(i=1,2,3,4)}$ = Koefisien regresi variabel eksogen

PMDN = PMDN (Milyar)

JLN = Panjang Jalan (%)

LTK = Pengguna Listrik (%)

TLP = Pengguna Telepon Seluler (%)

ε = Error term

Teknik pengolahan data menggunakan program Eviews12. Eviews merupakan *software* untuk analisis statistika dan ekonometrika. Eviews dapat digunakan untuk analisis dan evaluasi data ilmiah analisis keuangan, peramalan makroekonomi, simulasi, peramalan penjualan dan analisis biaya (Ajija, 2011).

Analisis data dengan metode regresi data panel harus mengikuti tahapan-tahapan tertentu untuk mengestimasi model yang sesuai. Ada tiga jenis pendekatan yang harus dilakukan, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM).

1. *Common Effect Model* (CEM)

Model CEM digunakan sebagai pendekatan model data panel yang sangat sederhana karena berupa kombinasi data *time series* dan *cross section* dalam bentuk *pool*, dan untuk estimasi koefisien digunakan teknik kuadrat terkecil atau *least square*.

2. *Fixed Effect Model* (FEM)

Asumsi Model FEM bahwa perbedaan antara unit dapat diketahui melalui perbedaan konstantanya. Model FEM, estimasi dapat dilakukan tanpa *no weighted* atau *Least Square Dummy Variabel* (LSDV) dan juga *cross section weight* atau *Generalized Least Square* (GLS).

3. *Random Effect Model* (REM)

Random effect model bertujuan untuk mengatasi kelemahan *fixed effect* yang menggunakan variabel semu, sehingga terjadi ketidakpastian dalam model. Ketika tidak terdapat variabel semu, maka *random effect* akan menggunakan residual, dengan asumsi memiliki hubungan antar waktu dan objek (Caraka & Yasin, 2017). Model pendekatan REM digunakan untuk menghilangkan heteroskedastisitas pada model. Model ini juga disebut dengan

Error Component Model (ECM) atau teknik *Generalized Least Square (GLS)*.

3.5.2. Pengujian Model

Penentuan model regresi data panel yang sesuai dilakukan dengan pengujian penelitian ini yaitu:

1. Uji Chow

Uji chow digunakan untuk menentukan model yang paling tepat digunakan dalam estimasi yaitu model *FEM* atau *CEM*. Uji Chow dapat dilakukan dengan uji restricted F-test. Hipotesis dalam pengujian ini sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect Model* lebih tepat dari pada *Fixed Effect Model*

H_a : *Fixed Effect Model* lebih tepat dari pada *Common Effect Model*

Pengujian ini mengikuti nilai probabilitas cross-section F . Apabila nilai probabilitas lebih besar dari $0,10$ (*cross-section* $F > \alpha = 0,10$) maka terima H_0 sehingga metode yang lebih baik digunakan adalah *common effect model (CEM)*, namun sebaliknya apabila nilai probabilitas lebih kecil dari $0,10$ (*cross-section* $F < \alpha = 0,10$), maka tolak H_0 sehingga metode yang digunakan adalah *fixed effect model*.

2. Uji Hausman

Uji hausman digunakan untuk menentukan model yang paling tepat digunakan yaitu antara *FEM* atau *REM*. Adapun uji hipotesis untuk pemilihan model pada uji Hausman, yaitu:

H_0 : *Random Effect Model* lebih tepat dari pada *Fixed Effect Model*

H_a : *Fixed Effect Model* lebih tepat dari pada *Random Effect Model*

Keputusan penerimaan hipotesis berdasarkan nilai probabilitas chi square. Adapun kriteria keputusan sebagai berikut:

- a. Apabila nilai probabilitas chi square $< \alpha = 0,10$ maka tolak H_0 sehingga model yang dipilih adalah *fixed effect*
- b. Apabila nilai probabilitas chi square $> \alpha = 0,10$ maka H_0 diterima sehingga model yang digunakan adalah *random effect*.

3. Uji *Lagrange Multiplier*

Uji *Lagrange Multiplier* (LM) bertujuan untuk membandingkan antara metode *common effects* dengan metode *random effects*. Langkah-langkah yang dilakukan dalam *Lagrange Multiplier-Test* adalah sebagai berikut:

- 1) Estimasi dengan Common Effect
- 2) Uji dengan menggunakan Lagrange Multiplier-Test
- 3) Melihat nilai probability F dan Chi-square dengan asumsi:
 - a. Bila nilai probability F dan Chi-square $> \alpha = 10\%$, maka uji regresi panel data menggunakan model Common Effect.
 - b. Bila nilai probability F dan Chi-square $< \alpha = 10\%$, maka uji regresi panel data menggunakan model Random Effect.

Atau dengan hipotesis sebagai berikut :

H_0 : Common Effect Model

H_a : Random Effect Model

Jika nilai probabilitas dalam uji Uji Lagrange Multiplier (LM) lebih kecil dari 10% maka H_0 ditolak yang berarti bahwa model yang cocok digunakan dalam persamaan analisis regresi tersebut adalah model *random effect*. Sebaliknya jika nilai probabilitas dalam uji Uji Lagrange Multiplier (LM) lebih besar dari 10% maka H_a diterima.

3.6 Uji Hipotesis

3.6.1 Uji T

Uji t bertujuan untuk melihat pengaruh secara parsial (individu) antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan menggunakan asumsi variabel lainnya adalah konstan. Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi $0,10$ (α) dengan nilai probabilitas. Kriteria keputusannya adalah ketika nilai probabilitas lebih kecil dari pada nilai $\alpha = 0,10$ maka variabel bebas secara signifikan mempengaruhi variabel terikat. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas lebih besar dari $\alpha = 0,10$ maka variabel bebas secara signifikan tidak mempengaruhi variabel terikat.

3.6.2 Uji F

Uji F merupakan suatu pengujian statistik secara keseluruhan (stimulant) variabel bebas terhadap variabel terikat. Melalui hasil uji-F dapat diketahui ada atau tidaknya variabel bebas yang masuk serta berpengaruh pada variabel terikat. Pengujian uji-F dilakukan

dengan menggunakan derajat signifikan nilai F. Kriteria pengujian simultan yaitu apabila nilai probabilitas lebih besar dari $\alpha = 0,10$ maka secara bersamaan variabel bebas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Sementara, apabila nilai probabilitas lebih kecil dari $\alpha = 0,10$ maka secara bersamaan variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

3.6.3 Koefisien Determinasi R^2

Koefisien determinasi merupakan nilai dari adjusted R^2 menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel bebas dapat menggambarkan variasi variabel terikat. Nilai *adjusted* R^2 berada diantara 0 atau 1 (positif). Apabila nilai adjusted R^2 sama dengan nol maka disimpulkan bahwa variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas. Kemudian, apabila nilai *adjusted* R^2 sama dengan satu maka dapat disimpulkan bahwa variasi variabel terikat seluruhnya dapat dijelaskan oleh variasi pada variabel bebas. Oleh karena itu, untuk memenuhi syarat keberhasilan tersebut nilai adjusted R^2 harus mendekati nilai satu atau seratus persen.

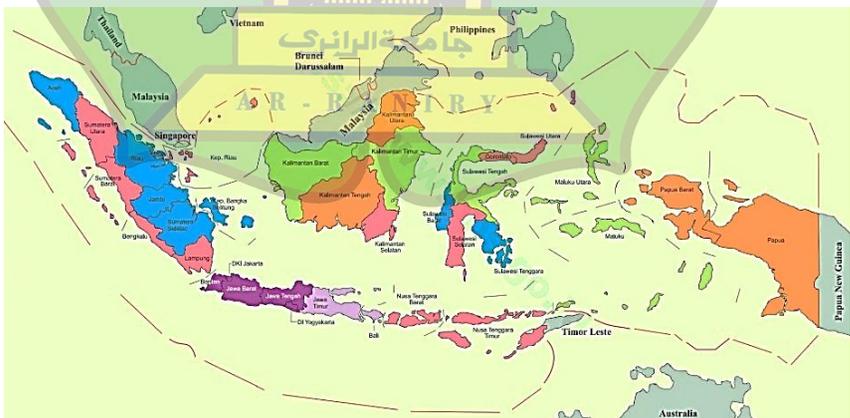
BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Indonesia merupakan negara yang memiliki luas wilayah mencapai 1.916.906,77 km² dengan memiliki 16.766 jumlah pulau, dimana secara astronomis Indonesia terletak antara 6⁰ 04' 30'' LU dan 11⁰ 00' 36'' LS dan antara 94⁰ 58' 21'' sampai dengan 141⁰ 01' 10'' BT. Sementara letak geografis, kepulauan Indonesia berada di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik (Badan Pusat Statistik, 2022). Indonesia terdiri dari 34 Provinsi yang terletak di lima pulau besar (Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan Pulau Papua) dan empat kepulauan (Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Nusa Tenggara dan Kepulauan Maluku).

Gambar 4.1 Peta Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ribuan pulau dan terhubung oleh selat dan laut, dimana pada tahun 2012 sebanyak 13.466 pulau berkoordinat dan terdaftar di Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB). Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 272.682,5 ribu jiwa di tahun 2021. Berikut tabel jumlah penduduk 34 Provinsi di Indonesia:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk 34 Provinsi di Indonesia

No.	Provinsi	Jumlah Penduduk (ribu)
1	Aceh	5.333,7
2	Sumatera Utara	14.936,2
3	Sumatera Barat	5.580,2
4	Riau	6.493,6
5	Jambi	3.585,1
6	Sumatera Selatan	8.550,9
7	Bengkulu	2.032,9
8	Lampung	9.081,8
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.473,2
10	Kepulauan Riau	2.118,2
11	DKI Jakarta	10.609,7
12	Jawa Barat	48.782,4
13	Jawa Tengah	36.742,5
14	DI Yogyakarta	3.712,9
15	Jawa Timur	40.878,8
16	Banten	12.061,5
17	Bali	4.362,7
18	Nusa Tenggara Barat	5.390,0
19	Nusa Tenggara Timur	5.387,7
20	Kalimantan Barat	5.470,8
21	Kalimantan Tengah	2.702,2
22	Kalimantan Selatan	4.122,6

Tabel 4.1 – Lanjutan

No.	Provinsi	Jumlah Penduduk (ribu)
23	Kalimantan Timur	3.808,2
24	Kalimantan Utara	713,6
25	Sulawesi Utara	2.638,6
26	Sulawesi Tengah	3.021,9
27	Sulawesi Selatan	9.139,5
28	Sulawesi Tenggara	2.659,2
29	Gorontalo	1.181,0
30	Sulawesi Barat	1.436,8
31	Maluku	1.862,6
32	Maluku Utara	1.299,2
33	Papua Barat	1.156,8
34	Papua	4.335,5
Indonesia		272.682,5

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas dapat diuraikan bahwa Jawa Barat memiliki jumlah penduduk tertinggi sebanyak 48.782,4 ribu jiwa dan Papua Barat memiliki jumlah penduduk terendah sebanyak 1.156,8 ribu jiwa di Indonesia. Data-data penelitian seluruh provinsi di Indonesia yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik akan diteliti hasilnya. Data penelitian tersebut adalah data Pembangunan Ekonomi Inklusif, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), data Infrastruktur Jalan, data Infrastruktur Listrik dan data Infrastruktur Telepon Seluler.

4.2 Deskripsi Penelitian

Penelitian ini menggunakan empat data yaitu: Pembangunan Ekonomi Inklusif diukur dengan indeks pembangunan ekonomi inklusif, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Infrastruktur

Jalan diukur melalui panjang jalan dengan kondisi baik, Infrastruktur Listrik diukur melalui pengguna listrik dan Infrastruktur Telepon Seluler diukur melalui pengguna telepon seluler selama lima tahun terakhir (2016 s/d 2020) yang terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Pembangunan Ekonomi Inklusif, PMDN, Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Listrik dan Infrastruktur Telepon Seluler di Indonesia Tahun 2016-2020

Tahun	Pembangunan Ekonomi Inklusif (Indeks)	PMDN (Miliyar Rupiah)	Jenis Infrastruktur		
			Panjang Jalan (%)	Pengguna Listrik (%)	Pengguna Telepon Seluler (%)
2016	5,66	216.230,8	55,84	97,62	58,30
2017	5,76	262.350,5	52,08	98,14	59,59
2018	5,77	328.604,9	50,26	98,51	62,41
2019	5,97	386.498,4	44,89	98,85	63,53
2020	5,54	413.535,5	40,46	96,95	62,84

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia diolah (2022)

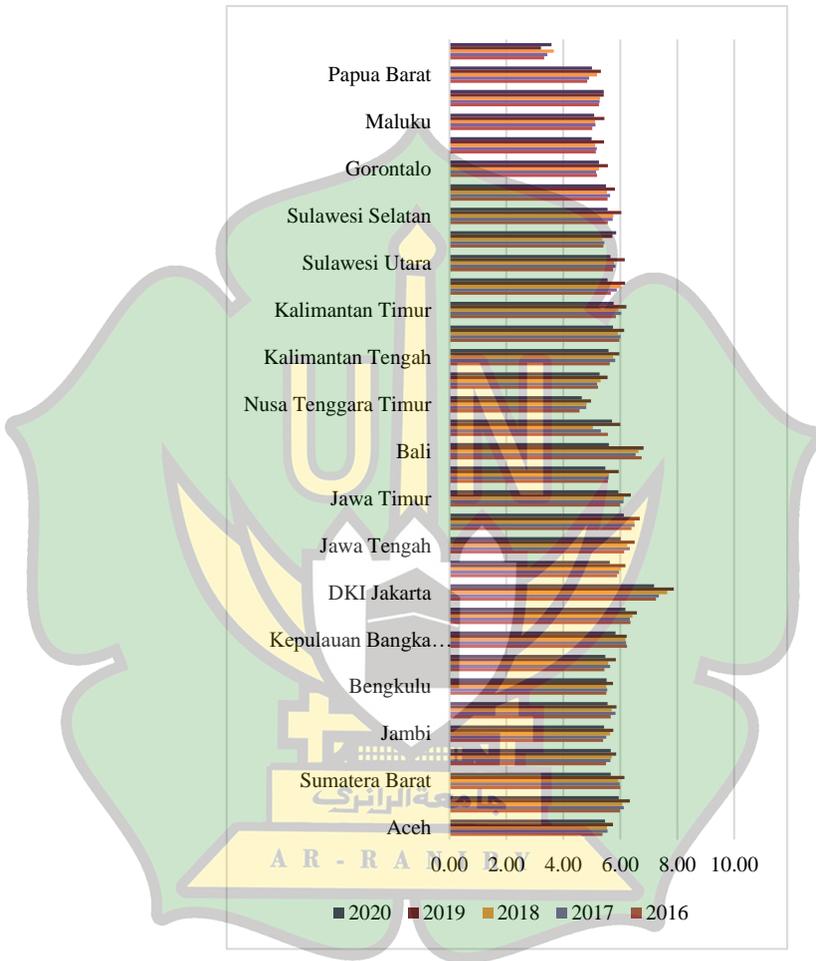
Berdasarkan Tabel 4.2 di atas diketahui bahwa indeks pembangunan ekonomi inklusif selama lima tahun terakhir (2017 s/d 2020) cenderung mengalami peningkatan, hanya saja pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 5,54 indeks angka ini turun sebesar 0,43 indeks dibandingkan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2019 sebesar 5,97 indeks. Investasi pemerintah dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya dalam waktu lima tahun terakhir, dimana pada tahun 2019 PMDN mencapai 386.498,4 Miliyar Rupiah

dan meningkat pada tahun 2020 yang mencapai 413.535,5 Miliar Rupiah. Perkembangan Infrastruktur Jalan diukur melalui panjang jalan dengan kondisi baik mengalami penurunan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2016 panjang jalan berkondisi baik sebesar 55,84% dan menurun pada tahun 2017 sebesar 52,08% hingga pada tahun 2020 panjang jalan dengan kondisi baik sebesar 40,46%. Besarnya persentase pengguna listrik dan pengguna telepon seluler mengalami kondisi yang sama yaitu mengalami kenaikan setiap tahunnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016 s/d 2020), hanya saja pengguna telepon seluler sedikit mengalami penurunan pada tahun 2020 dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 62,84% pengguna.

4.2.1 Pembangunan Ekonomi Inklusif

Pembangunan ekonomi inklusif menekankan bahwa capaian dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan peningkatan kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati dan berpartisipasi secara merata. Pembangunan inklusif menggambarkan adanya peluang baru dan jaminan atas aksesibilitas yang merata untuk seluruh masyarakat tanpa melihat kondisi dan latar belakang pribadi. Melalui penerapan pembangunan inklusif dapat menjadi solusi dari aspek sosial misalnya untuk mereduksi ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran. Berikut grafik data Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia tahun 2016 s/d 2020:

Gambar 4.2 Grafik Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi-Provinsi di Indonesia Tahun 2016 s/d 2020 (Indeks)



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia diolah (2022)

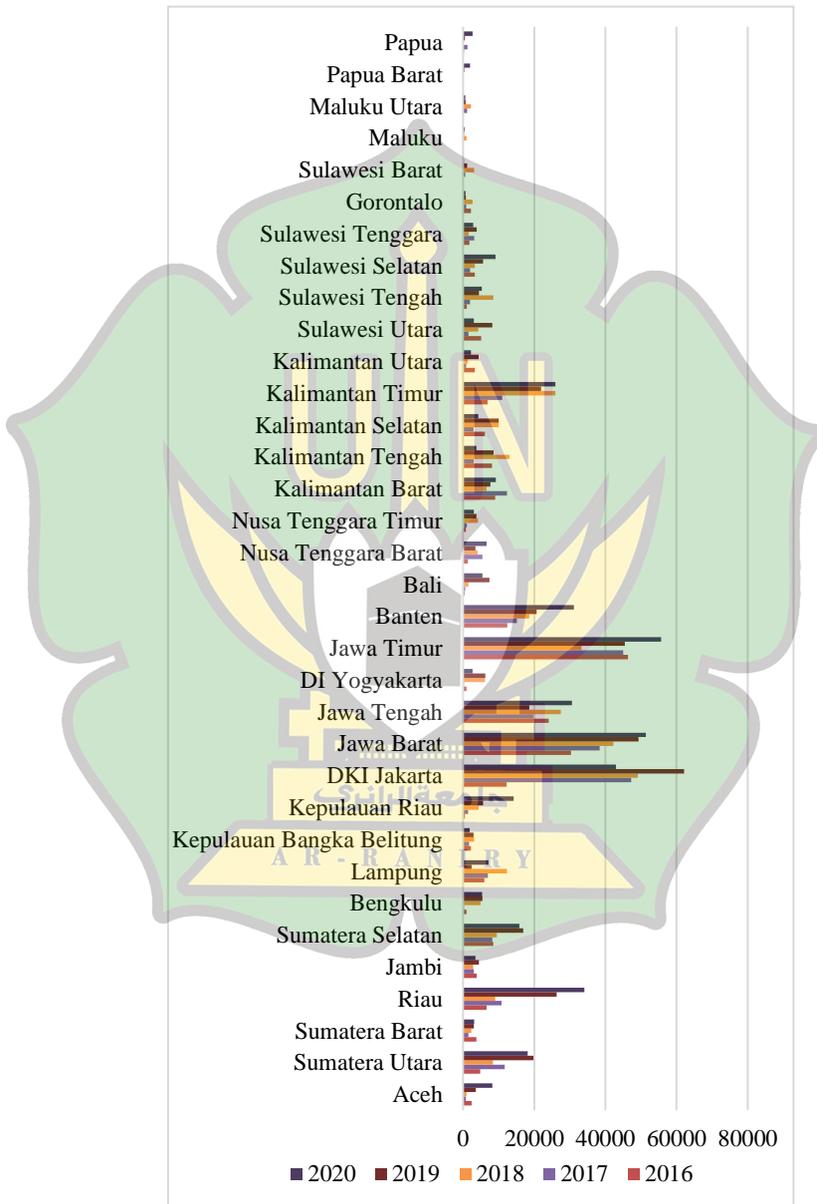
Berdasarkan Gambar 4.2 di atas menunjukkan bahwa Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (IPEI) di masing-masing provinsi di Indonesia selama lima tahun terakhir bervariasi, ada pertumbuhan yang tinggi dan ada pula yang rendah sesuai dengan kemampuan dalam memprioritaskan pembangunan. Terdapat tiga provinsi yang

memiliki capaian IPEI tertinggi pada tahun 2019 yaitu DKI Jakarta sebesar 7,88, Bali sebesar 6,82 dan DI Yogyakarta sebesar 6,69. Sementara, Papua menjadi provinsi yang mendapat capaian IPEI terendah pada tahun 2019 sebesar 3,22 dimana angka ini jauh di bawah dari provinsi-provinsi lainnya. IPEI Bali menjadi peringkat ke dua tertinggi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Bali sangat tinggi karena berpusat pada pada sektor jasa pariwisata dan seluruh kab/kota di Bali memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah dari angka nasional.

4.2.2 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan suatu kegiatan untuk menanam modal atau berinvestasi, dimana semakin banyak para investor untuk menanam modalnya maka semakin banyak sumber dana di dalam negeri. Maka, melalui modal dalam negeri tersebut dapat digunakan untuk melakukan usaha di negara sendiri, baik semua bidang yang terbuka bagi swasta atau yang dibina dan dipelopori serta dirintis oleh pemerintah. Berikut grafik data Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Indonesia tahun 2016 s/d 2020:

Gambar 4.3 Grafik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi-Provinsi di Indonesia Tahun 2016 s/d 2020 Milyar Rupiah)



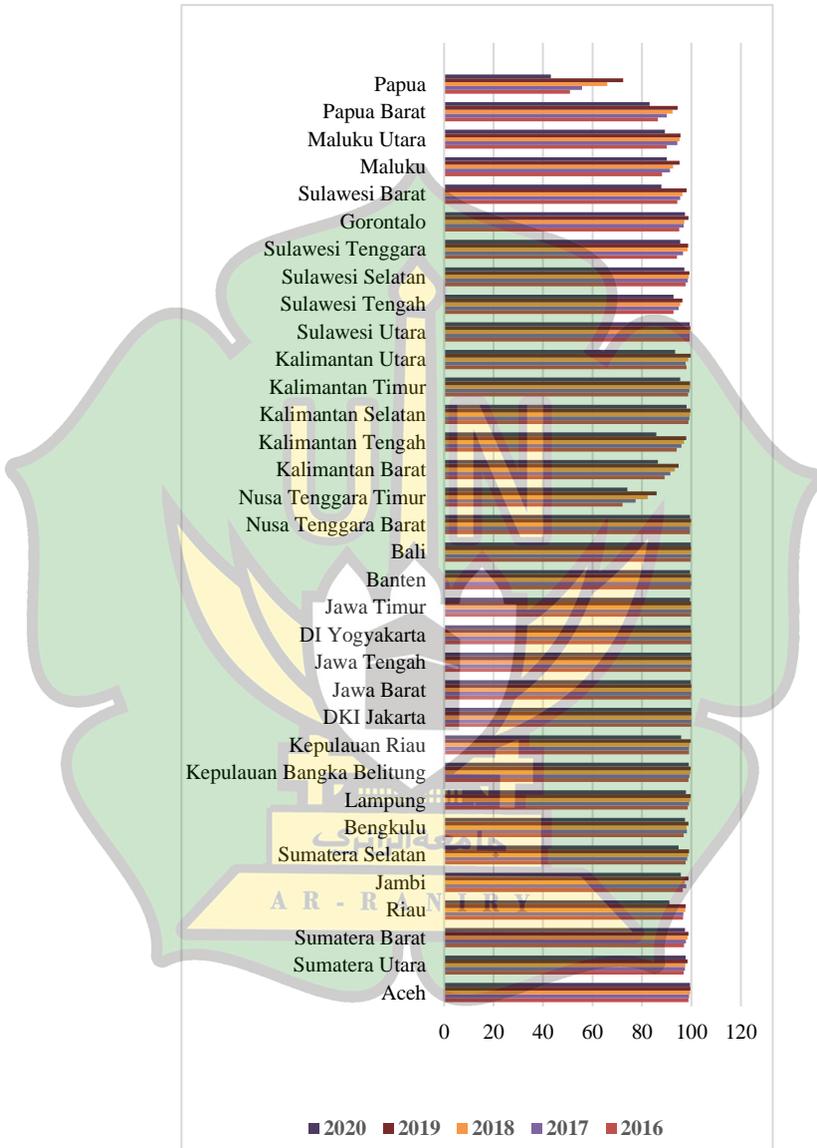
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia diolah (2022)

Berdasarkan Gambar 4.3 di atas diketahui bahwa selama lima tahun terakhir (2016 s/d 2020) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menunjukkan hanya beberapa provinsi saja yang mendapatkan investasi yang cukup besar, dimana tingkat PMDN satu provinsi dengan provinsi lainnya sangat signifikan perbedaannya. Tiga provinsi yang memiliki PMDN tertinggi pada tahun 2019 yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur, dengan jumlah investasi masing-masing sebesar 62.094,8 milyar rupiah, 49.284,2 milyar rupiah dan 45.452,7 milyar rupiah. Sementara, tiga provinsi yang memiliki PMDN terendah pada tahun 2019 yaitu Maluku, Papua Barat dan Papua dengan memiliki jumlah investasi masing-masing sebesar 283,2 milyar rupiah, 380,2 milyar rupiah dan 567,7 milyar rupiah.

4.2.3 Infrastruktur Jalan

Infrastruktur jalan sebagai prasarana publik yang berperan penting dalam mendukung semua aktivitas ekonomi suatu negara. Melalui pembangunan infrastruktur jalan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan sebuah bangsa baik dari segi sektor ekonomi, pendidikan, sosial budaya maupun dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. Berikut grafik data Infrastruktur Jalan di Indonesia tahun 2016 s/d 2020:

Gambar 4.4 Grafik Infrastruktur Jalan Provinsi-Provinsi di Indonesia Tahun 2016 s/d 2020 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia diolah (2022)

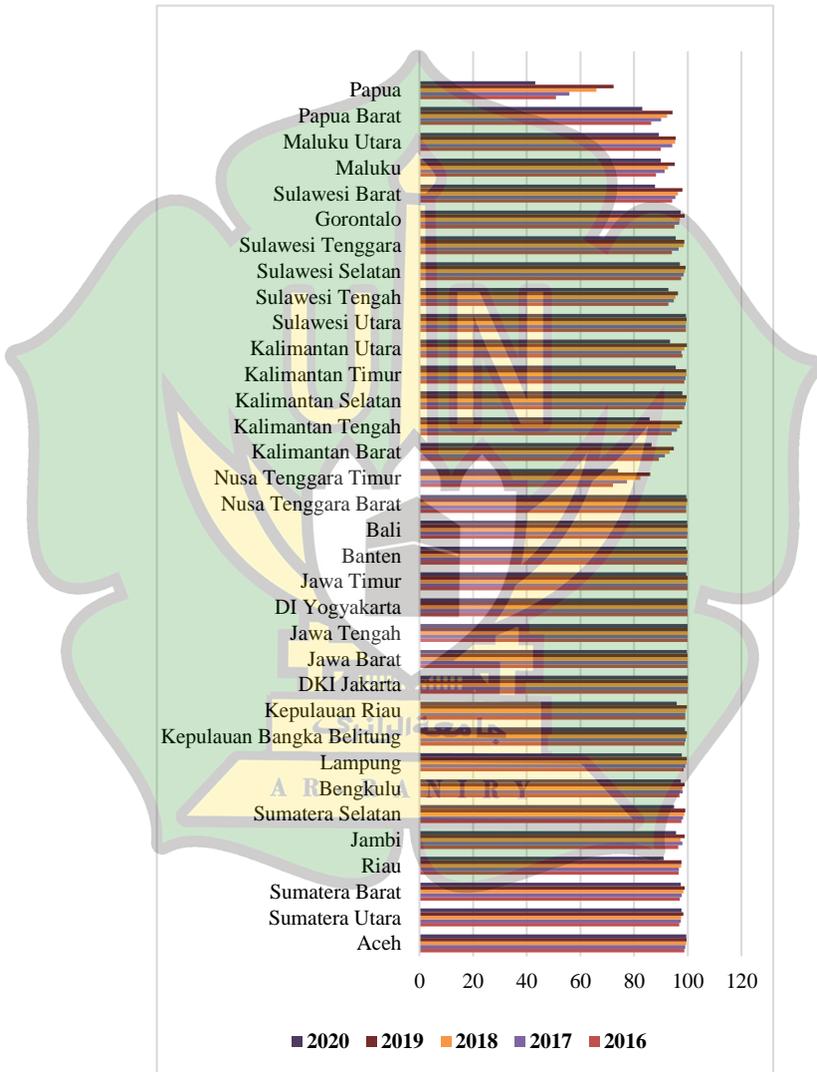
Berdasarkan Gambar 4.4 di atas diketahui bahwa Infrastruktur Jalan (diukur dengan panjang jalan berkondisi baik) di masing-masing provinsi di Indonesia selama lima tahun terakhir (2016 s/d 2020) Kepulauan Bangka Belitung memiliki panjang jalan berkondisi baik yang paling tinggi pada tahun 2016 mencapai 88,37% dibandingkan provinsi lainnya, hanya saja di tahun-tahun berikutnya panjang jalan dengan kondisi baik mengalami penurunan. Sementara, DKI Jakarta adalah Provinsi yang memiliki panjang jalan berkondisi baik yang hampir mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Dimana, mulai dari tahun 2017 – 2020 panjang jalan tumbuh positif hingga tahun 2020 kondisi jalan baik mencapai 38,13%. Pembangunan infrastruktur jalan bertujuan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan penambahan fasilitas jalan dan mengurangi kemiskinan.

4.2.4 Infrastruktur Listrik

Infrastruktur listrik berperan dalam menggerakkan perekonomian nasional, dimana melalui tenaga listrik dapat mendorong tumbuhnya industri yang akan menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan output yang memiliki daya saing secara ekonomi, sosial dan budaya. Maka penggunaan listrik dapat memicu peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan peningkatan perkapita masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat yang baik

akan tercapai. Berikut grafik data Infrastruktur Listrik di Indonesia tahun 2016 s/d 2020:

Gambar 4.5 Grafik Infrastruktur Listrik Provinsi-Provinsi di Indonesia Tahun 2016 s/d 2020 (%)



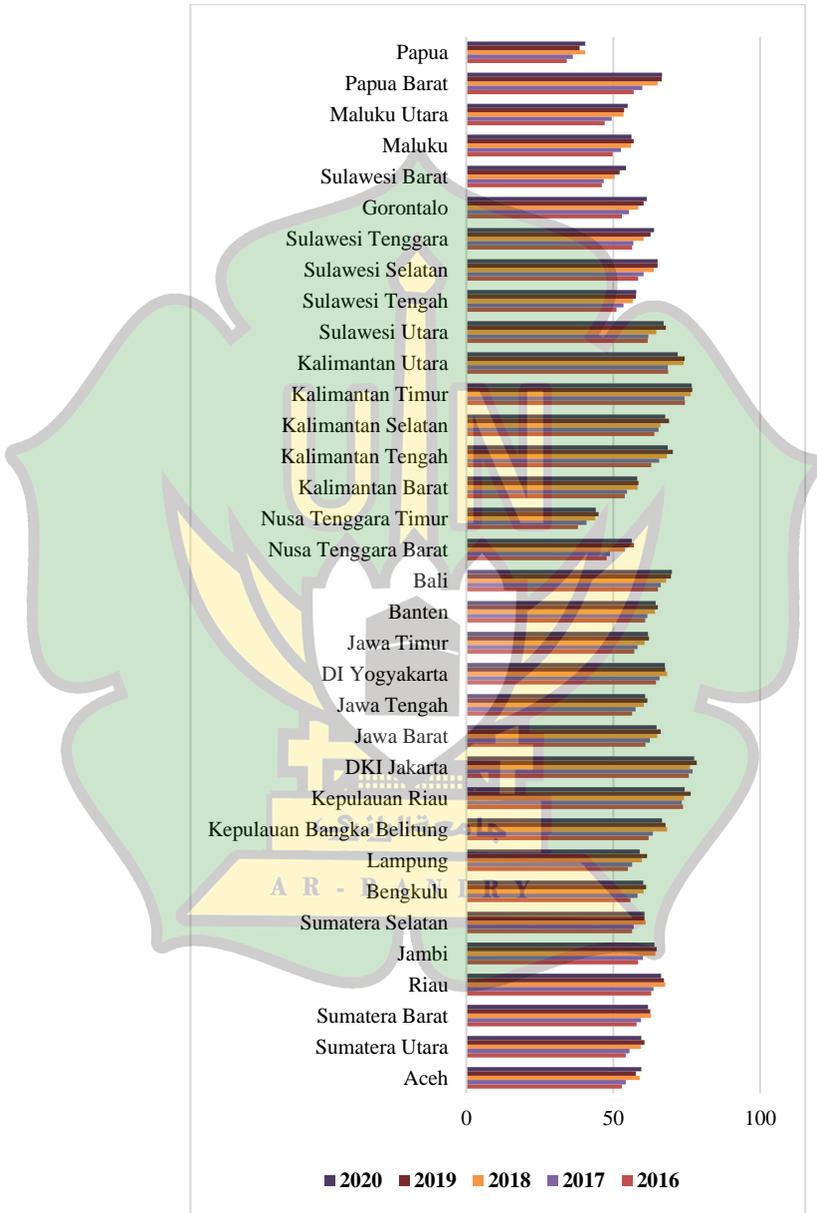
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia diolah (2022)

Berdasarkan Gambar 4.5 di atas diketahui bahwa Infrastruktur Listrik (diukur dengan pengguna listrik) di seluruh provinsi di Indonesia selama lima tahun terakhir (2016 s/d 2020) menunjukkan peningkatan setiap tahunnya walaupun ada beberapa provinsi yang mengalami penurunan pengguna listrik di tahun 2020 seperti Aceh, Riau, Jambi dan lain sebagainya. DKI Jakarta adalah provinsi yang memiliki persentase penggunaan listrik secara optimal selama 3 tahun terakhir yakni pada tahun 2017 – 2019 yaitu sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya manfaat listrik terhadap kehidupan modern masyarakat saat ini, dapat digunakan untuk kegiatan yang produktif seperti industri yang memang perlu memakai listrik dalam jumlah yang besar dan akan mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah positif.

4.2.5 Infrastruktur Telepon Seluler

Telepon seluler merupakan salah satu jenis infrastruktur ekonomi fisik berbentuk teknologi informasi yang penggunaannya cukup tinggi di kalangan masyarakat saat ini. Manfaat dari adanya telepon seluler dapat memberi kemudahan bagi penggunanya karena memiliki kemampuan lebih, mulai dari resolusi, fitur, hingga komputasi termasuk adanya sistem operasi mobile didalamnya. Berikut grafik data Infrastruktur Telepon Seluler di Indonesia tahun 2016 s/d 2020:

Gambar 4.6 Grafik Infrastruktur Telepon Seluler Provinsi-Provinsi di Indonesia Tahun 2016 s/d 2020 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia diolah (2022)

Berdasarkan Gambar 4.6 di atas diketahui bahwa Infrastruktur Telepon Seluler (diukur dengan pengguna telepon seluler) di seluruh provinsi di Indonesia selama lima tahun terakhir (2016 s/d 2020) setiap tahunnya mengalami kenaikan. DKI Jakarta memiliki pengguna telepon seluler yang paling banyak dibandingkan provinsi lainnya, dimana Persentase penggunaan telepon seluler di DKI Jakarta pada tahun 2019 sebanyak 78,42%. Hal ini terjadi karena banyaknya orang yang mulai menggunakan telepon seluler sebagai media untuk mempermudah akses dalam menjalankan kegiatan ekonomi.

4.3 Estimasi Regresi Data Panel

Pada penelitian ini menggunakan tiga macam pendekatan untuk menganalisis pengaruh penanaman modal dalam negeri dan infrastruktur (jalan, listrik dan telepon seluler) terhadap pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia diantaranya yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Dimana, penentuan model terbaik dari ketiga pendekatan tersebut dapat dilakukan menggunakan uji *Goodness of Fit* yaitu *Chow Test*, *Hausman Test* dan Uji LM (*Lagrange Multiplier*).

4.3.1 Uji Chow

Uji ini dilakukan untuk memilih model estimasi yang lebih sesuai dan lebih baik antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM) dalam regresi data panel. Dasar keputusan dengan membandingkan nilai *Cross-section F* dan taraf signifikan ($\alpha = 0,10$). Hipotesis dalam uji chow yaitu:

H_0 : *Common Effect Model* (CEM)

H_a : *Fixed Effect Model* (FEM)

Hasil *chow test* dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Hasil Chow Test

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	13.138047	(33,132)	0.0000
Cross-section Chi-square	247.351127	33	0.0000

Sumber: Data Diolah dengan Eviews (2022)

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa nilai Prob. *Cross-section F* sebesar 0,0000 atau lebih kecil dari 0,10 (α) maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya estimasi model data panel terbaik dalam penelitian menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) daripada menggunakan *Common Effect Model* (CEM).

4.3.2 Uji Hausman

Uji ini dilakukan untuk memilih model estimasi yang lebih sesuai dan lebih baik antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM) dalam regresi data panel. Dasar keputusan dengan membandingkan nilai *Cross-section random* dan taraf signifikan ($\alpha = 0,10$). Hipotesis dalam uji hausman yaitu:

H_0 : *Random Effect Model* (REM)

H_a : *Fixed Effect Model* (FEM)

Hasil uji hausman dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	19.939543	4	0.0005

Sumber: Data Diolah dengan Eviews (2022)

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa nilai Prob. *Cross-section random* sebesar 0,0005 atau lebih kecil dari taraf signifikan ($\alpha = 0,10$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya estimasi model data panel terbaik dalam penelitian menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) daripada menggunakan *Random Effect Model* (REM).

4.4 Model Regresi Panel *Fixed Effect Model* (FEM)

Pada estimasi regresi data panel, model terbaik yang terpilih setelah melakukan uji *Goodness of Fit* yaitu uji chow dan uji hausman adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Dimana, hasil pengolahan data menggunakan FEM dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5
Hasil Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.829101	0.596766	4.740720	0.0000
LN_PMDN	-0.013085	0.019028	-0.687662	0.4929
JLN	0.002083	0.001092	1.907907	0.0586
LTK	0.012165	0.005476	2.221324	0.0280
TLP	0.028151	0.006973	4.036969	0.0001
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.938751	Mean dependent var	5.700353	
Adjusted R-squared	0.921582	S.D. dependent var	0.654305	
S.E. of regression	0.183226	Akaike info criterion	-0.362131	
Sum squared resid	4.431472	Schwarz criterion	0.338812	
Log likelihood	68.78111	Hannan-Quinn criter.	-0.077696	
F-statistic	54.67909	Durbin-Watson stat	2.624496	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data Diolah dengan Eviews (2022)

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas bentuk persamaan model regresi data panel *Fixed Effect Model* (FEM), dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$PEI = 2.829101 - 0.013085LnPMDN + 0.002083JLN + 0.012165LTK + 0.028151TLP + \epsilon$$

Keterangan:

PEI : Pembangunan Ekonomi Inklusif

LnPMDN : Logaritma natural dari Penanaman Modal Dalam Negeri

JLN : Panjang Jalan

LTK : Pengguna Listrik

TLP : Pengguna Telepon Seluler

Berdasarkan hasil estimasi *Fixed Effect Model* (FEM) yang ditunjukkan pada tabel 4.4 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Apabila selama periode 2016-2020 penanaman modal dalam negeri, jalan, listrik dan telepon seluler diasumsikan tetap, maka pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia selama periode penelitian akan meningkat sebesar 2.829101 persen, artinya dengan adanya penanaman modal dalam negeri, jalan, listrik dan telepon seluler dapat meningkatkan pembangunan ekonomi inklusif. Kondisi ini terjadi dengan memperhitungkan seluruh variabel penelitian secara bersama-sama
2. Nilai koefisien variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar -0.013085 artinya jika setiap penambahan penanaman modal dalam negeri sebesar 1 persen, maka akan menurunkan nilai Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia sebesar 0.013085 persen dengan asumsi variabel lain tetap. PMDN memiliki pengaruh negatif terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia selama periode 2016-2020.
3. Nilai koefisien variabel Jalan (JLN) sebesar 0.002083 artinya jika setiap penambahan panjang jalan sebesar 1 persen, maka

akan meningkatkan nilai Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia sebesar 0.002083 persen dengan asumsi variabel lain tetap. Jalan memiliki pengaruh positif terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia selama periode 2016-2020.

4. Nilai koefisien Listrik (LTK) sebesar 0.012165 artinya apabila terjadi penambahan pemakaian listrik sebesar 1 persen, akan berdampak pada peningkatan nilai Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia yakni sebesar 0.012165 persen. Listrik memiliki pengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia selama periode 2016-2020.
5. Nilai koefisien Telepon Seluler (TLP) sebesar 0.028151 artinya apabila terjadi penambahan pengguna telepon seluler sebesar 1 persen, akan berdampak pada peningkatan nilai Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia yakni sebesar 0.028151 persen. Telepon Seluler memiliki pengaruh positif terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia selama periode 2016-2020.

4.5 Uji T

Uji ini dilakukan untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel bebas yaitu penanaman modal dalam negeri, jalan, listrik dan telepon seluler terhadap variabel terikat yaitu pembangunan ekonomi inklusif. Berikut tabel hasil uji T:

Tabel 4.6
Hasil Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.829101	0.596766	4.740720	0.0000
LN_PMDN	-0.013085	0.019028	-0.687662	0.4929
JLN	0.002083	0.001092	1.907907	0.0586
LTK	0.012165	0.005476	2.221324	0.0280
TLP	0.028151	0.006973	4.036969	0.0001

Sumber: Data Diolah dengan Eviews (2022)

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas dapat diketahui bahwa nilai koefisien variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (X_1) sebesar 0.0013085 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,4929 lebih besar dari 0,10 (α) artinya H_0 diterima dan H_a ditolak, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Penanaman Modal Dalam Negeri dengan Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia selama periode 2016-2020. Dimana memiliki nilai koefisien bernilai negatif, artinya pengaruh yang ditimbulkan adalah pengaruh negatif.

Variabel Jalan (X_2) memiliki nilai koefisien sebesar 0.002083 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,0586 lebih kecil dari 0,10 (α) artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Jalan dengan Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia selama periode 2016-2020. Dimana memiliki nilai koefisien bernilai positif, artinya pengaruh yang ditimbulkan adalah pengaruh positif.

Variabel Listrik (X_3) memiliki nilai koefisien sebesar 0.012165 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,0280 lebih kecil dari

0,10 (α) artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, yang menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel Listrik dengan Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia periode 2016-2020. Dimana, dengan memiliki nilai koefisien bernilai positif, artinya pengaruh yang ditimbulkan adalah pengaruh positif.

Variabel Telepon Seluler (X_4) memiliki nilai koefisien sebesar 0.028151 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,0001 lebih kecil dari 0,10 (α) artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, yang menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel Telepon Seluler dengan Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia selama periode 2016-2020. Dimana, dengan memiliki nilai koefisien bernilai positif maka pengaruh yang ditimbulkan juga pengaruh positif.

4.6 Uji F

Uji ini dilakukan untuk melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas yaitu penanaman modal dalam negeri, jalan, listrik dan telepon seluler secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat yaitu Pembangunan Ekonomi Inklusif. Berikut tabel hasil uji F:

Tabel 4.7
Hasil Uji F

<i>F-statistic</i>	54.67909
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000000

Sumber: Data Diolah dengan Eviews (2022)

Pada Tabel 4.7 di atas diperoleh nilai $F = 54.67909$ dengan $Prob = 0.000000$ lebih kecil dari $0,10$ (α) maka menolak H_0 dan menerima H_a , artinya Penanaman Modal Dalam Negeri, Jalan, Listrik dan Telepon Seluler secara bersama-sama mampu mempengaruhi Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia selama periode 2016-2020.

4.7 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi ini dilakukan untuk melihat besarnya persentase variasi variabel terikat pada model yang diterangkan oleh variabel bebasnya. Berikut tabel hasil uji koefisien determinasi (R^2):

Tabel 4.8
Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.938751
Adjusted R-squared	0.921582

Sumber: Data Diolah dengan Eviews (2022)

Pada Tabel 4.8 di atas diperoleh nilai Adjusted R-squared sebesar 0.921582 atau 92,15%, artinya model ini mampu menjelaskan pengaruh variabel Penanaman Modal Dalam Negeri, Jalan, Listrik dan Telepon Seluler terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif sebesar 92,15%. Sementara sisanya sebesar 7,85 dijelaskan diluar model dalam penelitian.

4.8 Pembahasan Penelitian

4.8.1 Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial penanaman modal dalam negeri berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia, artinya besarnya jumlah realisasi penanaman modal dalam negeri tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Arah pengaruh negatif menjelaskan bahwa PMDN paling banyak dipegang oleh pihak pemerintah dibandingkan pihak swasta, walaupun terkadang terjadi kerjasama antar keduanya seperti menjalankan proyek pembangunan infrastruktur. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa investasi dalam negeri dapat menyebabkan penurunan angka indeks ekonomi inklusif dan berdampak terhadap terbukanya kesempatan kerja masyarakat di Indonesia dan pengangguran semakin berkurang, sehingga kesejahteraan penduduk tercapai (Rowland, 2012).

Hal yang menyebabkan PMDN tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks ekonomi inklusif yakni disebabkan oleh realisasi pertumbuhan PMDN yang berfluktuatif dan tidak merata di masing-masing provinsi di Indonesia, dan hanya beberapa provinsi saja yang memiliki investasi yang besar menandakan bahwa masih kurangnya kepercayaan para investor untuk menanam modal di provinsi lainnya. Selain itu, koefisien penanaman modal dalam negeri bernilai negatif, artinya terdapat hubungan negatif antara penanaman

modal dalam negeri dengan indeks pembangunan ekonomi inklusif. Dimana, semakin tinggi nilai investasi dalam negeri di suatu wilayah maka semakin kecil pula nilai indeks pembangunan inklusif di wilayah tersebut. Sementara secara simultan penanaman modal dalam negeri, jalan, listrik dan telepon seluler secara bersama-sama mempengaruhi pembangunan ekonomi inklusif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ramdhan dan Setiadi (2019) yang menjelaskan secara parsial penanaman modal dalam negeri tidak berpengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi inklusif, artinya besarnya kontribusi investasi sektor swasta lebih memprioritaskan pada sektor industri yang menyebabkan kurangnya penyerapan tenaga kerja terutama tenaga kerja kelas menengah ke bawah yang juga menyebabkan kesenjangan sosial pada masyarakat.

4.8.2 Pengaruh Infrastruktur Jalan Terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial infrastruktur jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia, menunjukkan bahwa penambahan panjang jalan sangat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi inklusif. Dimana, panjang jalan yang berkondisi baik akan memudahkan masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Selain itu, kondisi jalan yang baik akan memudahkan masyarakat dalam mengakses jalan dari satu wilayah

ke beberapa wilayah lainnya di Indonesia. Kondisi jalan yang baik sangat berdampak terhadap sosial dan ekonomi masyarakat setempat, seperti masyarakat bisa dengan mudah untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan pelayanan ekonomi atau masyarakat menjadi semakin produktif untuk melakukan kegiatan produksi yang berdampak pada ekonomi masyarakat dan daya beli masyarakat akan meningkat menyebabkan pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan pendapatan akan berkurang. Dimana, peran infrastruktur jalan sebagai pemicu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mempengaruhi terbukanya lapangan pekerjaan atau aktivitas ekonomi yang kemudian dapat mendorong pembangunan ekonomi inklusif ke arah positif. Semakin banyak pembangunan infrastruktur jalan maka semakin banyak pula tenaga kerja dapat diserap dan pada akhirnya ekonomi di Indonesia semakin inklusif. Sementara secara simultan penanaman modal dalam negeri, jalan, listrik dan telepon seluler secara bersama-sama mempengaruhi pembangunan ekonomi inklusif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Panjaitan et al (2019) yang menunjukkan bahwa secara parsial pembangunan infrastruktur jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif, artinya infrastruktur jalan dapat meningkatkan akses kesempatan kerja serta distribusi pendapatan yang lebih merata. Arah pengaruh positif artinya apabila penambahan panjang jalan semakin meningkat maka pembangunan

ekonomi inklusif juga akan meningkat, karena jalan sebagai penghubung antara satu wilayah dengan wilayah lainnya yang dapat menggerakkan mobilitas kegiatan ekonomi masyarakat sehingga kesejahteraan meningkat dan daya beli masyarakat juga akan meningkat.

4.8.3 Pengaruh Infrastruktur Listrik Terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial infrastruktur listrik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia, dimana hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang menyatakan semakin meningkatnya infrastruktur listrik maka akan meningkatkan output yang ada dan akan berdampak terhadap peningkatan pembangunan ekonomi inklusif. Infrastruktur listrik berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi inklusif karena listrik sebagai sumber penerangan dan sebagai penggerak mesin-mesin di dalam dunia industri. Selain itu, ketersediaan infrastruktur listrik sangat membantu masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari baik untuk kegiatan yang produktif maupun yang hanya digunakan untuk mengoperasikan alat-alat rumah tangga seperti TV, mesin cuci, setrika dan lain sebagainya. Dimana, semakin banyaknya konsumsi listrik yang digunakan setidaknya dapat menambah infrastruktur listrik yang kemudian akan dapat menyerap tenaga kerja, sehingga pertumbuhan ekonomi semakin inklusif. Ekonomi inklusif artinya

dapat menurunkan tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja di Indonesia. Sementara, secara simultan penanaman modal dalam negeri, jalan, listrik dan telepon seluler secara bersama-sama mempengaruhi pembangunan ekonomi inklusif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ernawati dan Haical (2022) yang menunjukkan secara parsial infrastruktur listrik berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif, karena energi listrik adalah salah satu energi penting dalam menunjang aktivitas kehidupan manusia modern dimana hampir disemua bidang listrik diperlukan seperti untuk kegiatan rumah tangga, pendidikan, industri dan hampir semua kegiatan lainnya. Akses yang mudah dan konsumsi listrik yang semakin besar di suatu wilayah akan mempermudah kegiatan masyarakat sehari-hari dalam bekerja guna mencapai kesejahteraan dan mengurangi tingkat kemiskinan. Dimana, dengan terciptanya kesejahteraan masyarakat akan menjadi suatu bentuk terjadi pertumbuhan yang inklusif dan peran pertumbuhan ekonomi inklusif tersebut berpengaruh besar dalam upaya pengentasan kemiskinan.

4.8.4 Pengaruh Infrastruktur Telepon Seluler Terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial infrastruktur telepon seluler berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia, artinya

kenaikan jumlah pengguna telepon seluler dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dimana, di era modern saat ini, telepon seluler bukan barang yang susah untuk dicari dan sudah menjadi hal yang biasa dikalangan masyarakat. Telepon seluler tidak hanya digunakan untuk komunikasi biasa saja tapi sudah banyak digunakan untuk melakukan kegiatan bisnis. Banyaknya pengguna telepon seluler di seluruh wilayah Indonesia memiliki peran penting dalam perekonomian, khususnya ekonomi digital yang dapat memberikan kemudahan produsen dan konsumen dalam melakukan transaksi, komunikasi bisnis dan lain sebagainya sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sementara, secara simultan penanaman modal dalam negeri, jalan, listrik dan telepon seluler secara bersama-sama mempengaruhi pembangunan ekonomi inklusif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kamilla, Sasana & Sugiharti (2021) menunjukkan bahwa secara parsial infrastruktur telepon seluler berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif, artinya dampak dari penggunaan telepon seluler memiliki kontribusi untuk mendukung kegiatan ekonomi. Hal ini karena telepon seluler mempermudah masyarakat dalam mengakses semua informasi dengan biaya yang lebih rendah.

4.8.5 Pengaruh Secara Simultan Penanaman Modal Dalam Negeri, Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Listrik dan Infrastruktur Telepon Seluler Terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia

Berdasarkan penelitian ini bahwa secara simultan Penanaman Modal Dalam Negeri, Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Listrik dan Infrastruktur Telepon Seluler secara bersama-sama mempengaruhi Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia, dengan nilai signifikansi 0.00 lebih kecil dari 0.10 (α).

Pembangunan ekonomi inklusif secara merata dapat membawa dampak terhadap peningkatan standar hidup masyarakat di Indonesia, dimana dalam bentuk investasi berupa penanaman modal dalam negeri dapat digunakan untuk keperluan pembangunan infrastruktur (jalan, listrik dan telepon seluler) semakin lebih baik lagi kedepannya. Oleh karena itu, kebutuhan fasilitas publik masyarakat dapat terpenuhi maka kesejahteraan masyarakat tercapai, yang kemudian akan menyerap tenaga kerja lebih optimal dalam perekonomian suatu negara serta mengurangi ketimpangan, kemiskinan dan pengangguran.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta Analisa data yang dilakukan mengenai penanaman modal dalam negeri, infrastruktur jalan, infrastruktur listrik, infrastruktur telepon seluler terhadap pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia, maka penulis dapat memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanaman Modal Dalam Negeri memiliki pengaruh negatif terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia. Artinya jika setiap penambahan penanaman modal dalam negeri sebesar 1 persen maka akan menurunkan nilai Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia sebesar 0.013085 persen dengan asumsi variable lain tetap.
2. Infrastruktur Jalan memiliki pengaruh positif terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia. Artinya jika setiap penambahan panjang jalan sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan nilai Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia sebesar 0.002083 persen dengan asumsi variable lain tetap.
3. Infrastruktur Listrik memiliki pengaruh positif terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia. Artinya apabila terjadi penambahan pemakaian listrik sebesar 1 persen, akan

berdampak pada peningkatan nilai Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia sebesar 0.012165 persen.

4. Infrastruktur Telepon Seluler memiliki pengaruh positif terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia. Artinya apabila terjadi penambahan pengguna telepon seluler sebesar 1 persen, akan berdampak pada peningkatan nilai Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia sebesar 0.28151 persen.
5. Hasil uji signifikansi simultan (Uji F) menyatakan bahwa secara simultan Penanaman Modal Dalam Negeri, Infrastruktur Jalan, Infrastruktur listrik dan Infrastruktur Telepon Seluler secara Bersama-sama mempengaruhi Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia, dengan nilai signifikansi 0.00 lebih kecil dari 0.10 (α).

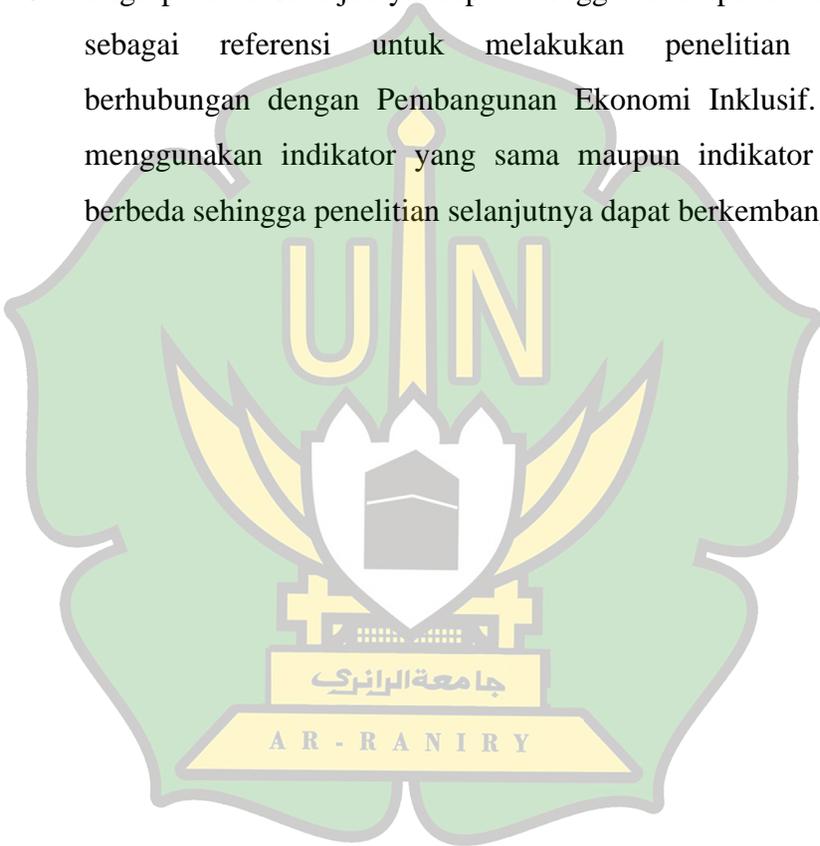
5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang diberikan penulis sebagai berikut:

1. Pembangunan inklusif menggambarkan adanya peluang baru dan jaminan atas aksesibilitas yang merata untuk seluruh masyarakat tanpa melihat kondisi dan latar belakang pribadi. Maka pembangunan ekonomi Inklusif harus lebih tumbuh cepat agar dapat menurunkan tingkat kemiskinan, kesenjangan dan pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja dan memudahkan investor untuk membuka usaha.
2. Pemerintah harus terus memberi perhatian dalam meningkatkan investasi dalam negeri. Meningkatkan fasilitas kepada

masyarakat baik dalam bidang infrastruktur dan memberikan peluang bagi para investor dalam negeri dalam melaksanakan kemajuan setiap fasilitas dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap kesempatan kerja.

3. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan Pembangunan Ekonomi Inklusif. Baik menggunakan indikator yang sama maupun indikator yang berbeda sehingga penelitian selanjutnya dapat berkembang



DAFTAR PUSTAKA

- Ajija, S.(2011). *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arvianda, Khairunnisa Maynora. (2021). *Pengaruh Penanaman Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Indonesia*. Ringkasan Skripsi. STIE Yayasan Keluarga Pahawan Negara. Yogyakarta.
- Bappenas. (2014).*Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif*. <http://inklusif.bappenas.go.id>.
- Benoit, Kenneth. (2011). *Linear Regression Models with Logarithmic Transformations*. Methodology Institute, London School of Economics.
- BPS. (2021).*Berita Resmi Statistik*. <http://bps.go.id>.
- Bungin, B. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Canning dan Pedroni. (2014).*The Effect of Infrastructure on Long Run Economic Growth*. Harvard University.
- Daeng, Intan Trivena, N.N. Mewengkang, dan Edmon R. Kalesaran. 2017. *Penggunaan Smartphone dalam Menunjang Aktivitas Perkuliahan oleh Mahasiswa Unsrat Manado*. E Journal Acto Diurno Vol.VI no.1.
- Dumairy. (2013).*Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Fitrianasari, Khusnul Chotimah dan Ovilia Vebi Arnida. (2022). *Analisis Dampak Kebijakan Makroekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Provinsi di Pulau Sumatera*

Tahun 2015-2020. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik* Vol.7 No.1.ISSN: 2527-2772.

- Focus Group Discussion (FGD) UGM. (2016). *Keterjaminan dan Keamanan Pasokan Energi Listrik untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. Pusat Studi Energi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. (2017). *Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haichal, I & Ernawati. (2022). *Analisis Spasial Pertumbuhan Inklusif Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2015-2020*.
- Hapsari, T. (2011). *Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Hartati, Yuniar. (2021). *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol.12 No.1.
- Indarparawansa, Khififah. 2021. *Gubernur Khofifah: Kemitraan Investor dengan UMKM Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif*. Siaran Pers DPMPSTP Provinsi Jawa Timur. <https://dpmpstp.jatimprov.go.id/gubernur-khofifah-kemitraan-investor-dengan-umkm-mendorong-pertumbuhan-ekonomi-yang-inklusif/?lang=en>. Diakses tanggal 18 Juli 2022.
- Kamilla, S., Sasana, H., dan Sugiharti, R. (2019). *Pengaruh Teknologi dan Komunikasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi*

di Indonesia Tahun 2012-2019. Journal of Economic. Vol. 3. No.4

Klasen, S. (2015). *Measuring and monitoring inclusive growth: Multiple definitions, open questions, and some constructive proposals*.

Klasen, S dan Lamanna, F.(2013). *The Impact of Gender Inequality in Education and Employment on Economic Growth: New Evidence for a Panel of Countries*. Feminist Economics, 15 (3): 91-132.

Kristiono. (2021). *Smartphone Memiliki Kontribusi bagi Pertumbuhan Ekonomi*. <http://www.indotelko.com>.

Maryam, St dan M. Irwan.(2022). *Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.4 No.1.

MediaIndonesia. 2022.*Listrik Guna Mendorong Perekonomian*. <http://mediaindonesia.com>.

Nuritasari, Firdausi. (2013). *Pengaruh Infrastruktur, PMDN, dan PMA terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia*. Economics Development Analyss Journal Volume 2 No. 4. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj/article/view/3213>.Diakses tanggal 18 Juli 2022.

Panjaitan,Hendra Andy Mulia, Sri mulatsih, dan Wiwiek Rindayati. (2019). *Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, 8(1):43-61.

Prasetyia, Ferry. (2021). *Kualitas Pemerintahan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Jawa Timur*. Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 5 Nomor 1.

- Rahmawati, L. Lutfiani, Zulvita R. Yunia, Isma'iddatur Rofiqoh, Fitri F. Zahrok dan D. Wahyuningtyas. (2021). *Dampak Pandemic Covid-19 terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Jawa Timur Indikator tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan*. Efektor Vol 8 No.1
- Ramadhan R.R., dan Setiadi. Y. (2019). *Pengaruh Modal Fisik dan Sumber Daya Manusia terhadap Indeks Inklusif di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 17 No. 2.
- Rowland, B.F., Pasaribu. (2012). *Literatur Pengajaran Ekonomi Pembangunan*. Depok: Universitas Gundama
- Saril, Bob. (2019). *Ekonomi Mulai Menggeliat PLN Jalankan 4 Strategi Untuk Dorong Konsumsi Listrik*. <https://web.pln.co.id/media/siaran-pers/2021/09/ekonomi-mulai-menggeliat-pln-jalankan-4-strategi-untuk-dorong-konsumsi-listrik>.
- Sheraphim, Graceilla Kristia. (2018). *Pengaruh Tingkat Inklusi Keuangan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di 33 Provinsi Indonesia Periode 2011-2016*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/4939/4339>. Diakses tanggal 18 Juli 2022.
- Sibarani, M. (2013). *Kontribusi Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: FE UI.
- Tambunan. (2016). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Todaro, Michael P, Smith Stephen C. (2015). *Economic Development. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data*. New York University and The George Washington University.

- Widyasanti, Amalia Adininggar. (2019). *Pembangunan Ekonomi Inklusif untuk Penurunan Kemiskinan yang Berkelanjutan*. Kementerian PPN / Bappenas.
- World Bank. 1994. *World Development Report: infrastructure for development*. New York (US): Oxford University Press, Inc.
- Yanuar. (2016). *Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*. Media Riset Akuntansi Vol.1 No.2.
- Zahara, Ervita Luluk dan Octavia, Emillia. (2021). *Referensi:Perkembangan PMDN dan PMA di Indonesia Tahun 2016-2020*. Pusat Kajian Anggaran. Badan Keahlian-Sekretariat Jenderal. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jakarta.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penanaman Modal Dalam Negeri, Infrastruktur Jalan Infrastruktur Listrik, Infrastruktur Telepon Seluler, Pembangunan Ekonomi Inklusif Tahun 2016-2020

Provinsi	Tahun	PEI	PMDN	JLN	LTK	TLP
Aceh	2016	5,38	2456,1	72,41	98,74	52,97
Aceh	2017	5,56	782,8	27,09	99,02	54,21
Aceh	2018	5,53	970	51,98	99,42	59,05
Aceh	2019	5,74	3606,9	57,68	99,55	57,75
Aceh	2020	5,46	8241,1	47,58	99,39	59,6
Sumatera Utara	2016	5,99	4864,2	20,06	96,84	54,28
Sumatera Utara	2017	6,12	11683,6	7,49	97,41	55,55
Sumatera Utara	2018	6,07	8371,8	38,72	97,55	59,45
Sumatera Utara	2019	6,34	19749	35,12	98,37	60,66
Sumatera Utara	2020	5,95	18189,5	52,69	97,64	59,56
Sumatera Barat	2016	6	3795,6	52,12	97,02	57,94
Sumatera Barat	2017	5,98	1517	60,24	97,81	59,44
Sumatera Barat	2018	5,93	2309,4	61,53	98,36	62,83
Sumatera Barat	2019	6,15	3026,6	47,25	98,8	62,62
Sumatera Barat	2020	5,67	3106,2	37,38	97,39	61,83
Riau	2016	5,5	6613,7	53,13	96,57	62,98
Riau	2017	5,66	10829,8	82,44	96,69	63,64
Riau	2018	5,7	9056,4	28,76	97,49	67,74
Riau	2019	5,86	26292,2	49,85	97,65	67,29
Riau	2020	5,67	34117,8	21,26	91,04	66,35
Jambi	2016	5,4	3884,4	72,81	96,52	58,49
Jambi	2017	5,51	3006,6	82,58	97,96	60,08
Jambi	2018	5,64	2876,5	63,36	97,35	64,29
Jambi	2019	5,76	4437,4	45,96	98,85	64,75

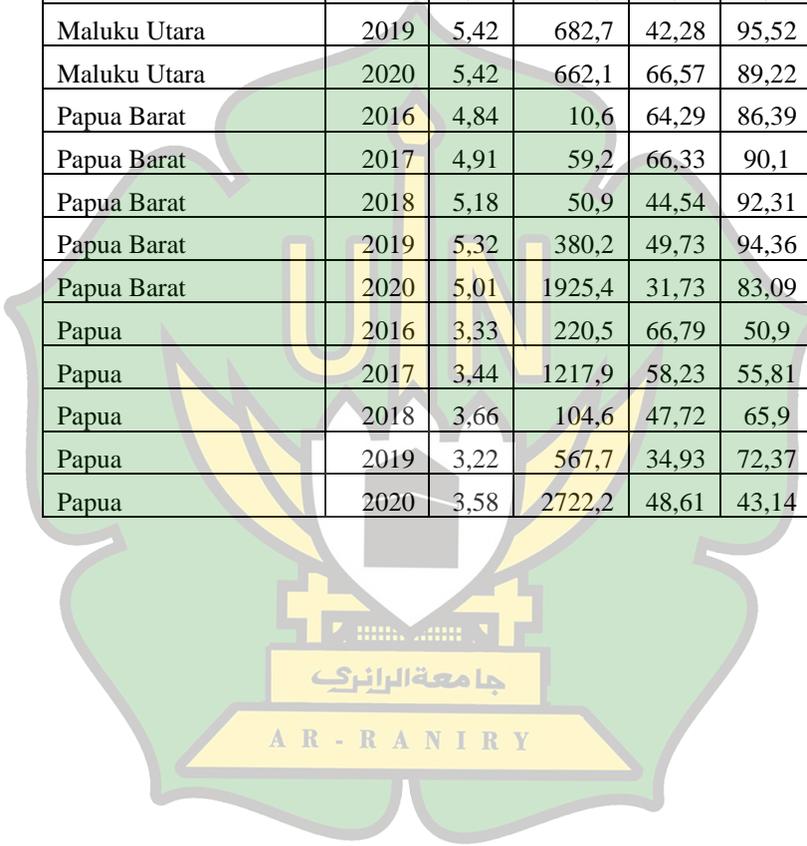
Jambi	2020	5,43	3511,7	41,63	95,68	64,06
Sumatera Selatan	2016	5,67	8534,1	31,1	97,64	56,48
Sumatera Selatan	2017	5,83	8200,2	28,32	98,3	57,01
Sumatera Selatan	2018	5,7	9519,8	28,57	98,74	61,12
Sumatera Selatan	2019	5,87	16921,1	35,08	99,1	60,7
Sumatera Selatan	2020	5,55	15824,5	33,79	94,87	60,68
Bengkulu	2016	5,51	949,1	72,21	96,89	55,84
Bengkulu	2017	5,54	296,5	75,93	98,11	58,3
Bengkulu	2018	5,51	4902,8	64,48	98,05	60,31
Bengkulu	2019	5,75	5458,1	37,76	98,79	61,18
Bengkulu	2020	5,52	5399,2	44,97	97,36	60,19
Lampung	2016	5,44	6031,8	60,56	98,5	55,07
Lampung	2017	5,64	7014,8	60,54	99,06	56,44
Lampung	2018	5,58	12314,7	44,14	99,54	59,81
Lampung	2019	5,84	2428,9	14,68	99,64	61,54
Lampung	2020	5,48	7120,5	39,64	97,81	59,03
Kep. Bangka Belitung	2016	6,24	2202	88,37	98,8	62,12
Kep. Bangka Belitung	2017	6,2	1734,7	79,29	99,17	63,43
Kep. Bangka Belitung	2018	6,18	3112,9	76,97	99,54	68,41
Kep. Bangka Belitung	2019	6,23	2915,2	46,66	99,71	67,77
Kep. Bangka Belitung	2020	5,83	1863,8	72,83	98,98	66,61
Kep. Riau	2016	6,36	492,5	60,23	99,1	73,77
Kep. Riau	2017	6,34	1398	54,4	99,1	73,35
Kep. Riau	2018	6,43	4386	59,71	99,26	74,11
Kep. Riau	2019	6,58	5656,4	34,98	99,64	76,39
Kep. Riau	2020	6,18	14249	58,63	95,85	74,33
Dki Jakarta	2016	7,26	12216,9	28,32	99,9	75,78
Dki Jakarta	2017	7,36	47262,3	24,2	100	76,99
Dki Jakarta	2018	7,65	49097,4	25,48	100	76,16
Dki Jakarta	2019	7,88	62094,8	38,13	100	78,42
Dki Jakarta	2020	7,19	42954,7	38,13	99,99	77,57
Jawa Barat	2016	5,89	30360,2	48,79	99,85	60,99

Jawa Barat	2017	5,96	38390,6	44,79	99,91	62,55
Jawa Barat	2018	6,02	42278,2	40,79	99,94	65,01
Jawa Barat	2019	6,18	49284,2	87,64	99,96	66,24
Jawa Barat	2020	5,63	51400,5	31,94	99,64	64,83
Jawa Tengah	2016	6,14	24070,4	47,52	99,88	56,41
Jawa Tengah	2017	6,34	19866	53,4	99,91	57,62
Jawa Tengah	2018	6,25	27474,9	38,75	99,92	60,47
Jawa Tengah	2019	6,51	18654,7	39,8	99,93	61,66
Jawa Tengah	2020	6,01	30606,1	45,45	99,85	60,87
Di Yogyakarta	2016	6,39	948,6	59,88	99,93	64,57
Di Yogyakarta	2017	6,5	294,6	87,54	99,9	65,73
Di Yogyakarta	2018	6,49	6131,7	71,81	99,92	68,32
Di Yogyakarta	2019	6,69	6298,8	64,34	99,82	67,66
Di Yogyakarta	2020	6,13	2683,4	67,16	99,74	67,62
Jawa Timur	2016	5,99	46331,6	58,39	99,85	57,21
Jawa Timur	2017	6,11	45044,5	41,95	99,92	58,3
Jawa Timur	2018	6,12	33333,1	40,57	99,85	60,66
Jawa Timur	2019	6,37	45452,7	31,57	99,89	62,16
Jawa Timur	2020	5,93	55660,6	50,06	99,47	61,82
Banten	2016	5,57	12426,3	51,25	99,72	60,92
Banten	2017	5,59	15141,9	30,03	99,95	61,63
Banten	2018	5,6	18637,6	17,93	99,77	64,25
Banten	2019	5,95	20708,4	56,46	99,86	65,21
Banten	2020	5,48	31145,7	26,37	99,39	64,4
Bali	2016	6,75	482,3	51,12	99,73	65,19
Bali	2017	6,54	592,5	52,77	99,85	66,24
Bali	2018	6,64	1548,8	75,63	99,82	67,99
Bali	2019	6,82	7393,2	52,36	99,87	69,61
Bali	2020	5,6	5432,7	30,3	99,75	69,93
Nusa Tenggara Barat	2016	5,57	1342,8	37,03	99,39	47,79
Nusa Tenggara Barat	2017	5,32	5413,5	14,15	99,43	48,96
Nusa Tenggara Barat	2018	5,04	4135,1	70,73	99,68	53,88

Nusa Tenggara Barat	2019	6	3519	58,59	99,77	57,1
Nusa Tenggara Barat	2020	5,71	6582,4	35,26	99,43	56,36
Nusa Tenggara Timur	2016	4,57	822,2	62,66	72,14	37,96
Nusa Tenggara Timur	2017	4,8	1081,9	59,39	77,36	40,97
Nusa Tenggara Timur	2018	4,82	4246,1	66,49	82,34	43,91
Nusa Tenggara Timur	2019	4,97	3752,6	68,31	85,98	45,01
Nusa Tenggara Timur	2020	4,65	3028,5	34,24	74,05	44,12
Kalimantan Barat	2016	5,22	9015,5	66,12	89,17	53,94
Kalimantan Barat	2017	5,18	12380,9	67,53	91,51	54,73
Kalimantan Barat	2018	5,31	6591,4	68,6	93,2	58,25
Kalimantan Barat	2019	5,55	7699,1	18,48	94,77	58,57
Kalimantan Barat	2020	5,27	9256,5	43,16	86,48	58,11
Kalimantan Tengah	2016	5,63	8179,1	36,73	93,99	62,89
Kalimantan Tengah	2017	5,82	3037,8	45,81	96	65,64
Kalimantan Tengah	2018	5,74	13091,6	45,98	97,04	68,2
Kalimantan Tengah	2019	5,97	8591,9	45,37	97,9	70,28
Kalimantan Tengah	2020	5,59	3710	30,53	85,73	68,56
Kalimantan Selatan	2016	5,97	6163	66,51	98,74	63,97
Kalimantan Selatan	2017	6,01	2981,9	58,22	99,16	65,42
Kalimantan Selatan	2018	5,92	9975,2	47,58	99,46	66,04
Kalimantan Selatan	2019	6,14	10061	34,53	99,58	68,97
Kalimantan Selatan	2020	5,75	4286,3	42,34	98,04	67,69
Kalimantan Timur	2016	5,85	6885,1	49,12	98,67	74,47
Kalimantan Timur	2017	6,04	10980,2	58,49	99,14	74,3
Kalimantan Timur	2018	5,95	25942	33,62	99,53	76,36
Kalimantan Timur	2019	6,22	21952	72,89	99,46	76,88
Kalimantan Timur	2020	5,77	25934	7,45	95,46	76,71
Kalimantan Utara	2016	5,67	3345,7	39,28	98	68,72
Kalimantan Utara	2017	5,88	853,3	71,88	97,62	68,62
Kalimantan Utara	2018	6,04	1356,8	55,27	98,71	73,99
Kalimantan Utara	2019	6,17	4400,9	53,81	99,72	74,32
Kalimantan Utara	2020	5,55	2235,2	12,05	93,36	71,95

Sulawesi Utara	2016	5,74	5069,6	69,82	99,36	61,78
Sulawesi Utara	2017	5,83	1488,2	48,32	99,3	61,95
Sulawesi Utara	2018	5,78	4320,1	50,79	99,47	64,64
Sulawesi Utara	2019	6,16	8259,6	56,5	99,55	67,9
Sulawesi Utara	2020	5,65	3005,6	40,41	99,27	67,13
Sulawesi Tengah	2016	5,41	1081,2	52,84	92,79	51,08
Sulawesi Tengah	2017	5,44	1929,7	52,06	94,85	53,49
Sulawesi Tengah	2018	5,38	8488,9	48,07	95,41	56,66
Sulawesi Tengah	2019	5,72	4438,8	37,32	96,34	57,68
Sulawesi Tengah	2020	5,86	5261,3	40,47	92,79	57,89
Sulawesi Selatan	2016	5,57	3334,6	35,43	97,58	58,5
Sulawesi Selatan	2017	5,73	1969,4	48,02	98,53	60,3
Sulawesi Selatan	2018	5,76	3275,9	62,45	98,9	63,85
Sulawesi Selatan	2019	6,04	5672,6	30,9	99,18	65,07
Sulawesi Selatan	2020	5,56	9142	40,45	97,1	65,14
Sulawesi Tenggara	2016	5,55	1794,2	59,37	94,11	56,39
Sulawesi Tenggara	2017	5,64	3148,7	52,69	96,55	56,85
Sulawesi Tenggara	2018	5,53	1603,4	54,74	98,43	60,34
Sulawesi Tenggara	2019	5,81	3827,1	55,89	98,72	62,68
Sulawesi Tenggara	2020	5,5	2865,7	39,77	95,47	63,86
Gorontalo	2016	5,19	2202,5	70,65	95,05	52,93
Gorontalo	2017	5,15	888,4	59,94	96,86	55,36
Gorontalo	2018	5,25	2666,8	44,19	97,08	58,5
Gorontalo	2019	5,57	844,4	60,93	98,8	60,36
Gorontalo	2020	5,25	683,6	49,96	97,34	61,42
Sulawesi Barat	2016	5,14	84,1	60,16	94,25	46,17
Sulawesi Barat	2017	5,17	660,2	48,6	95,39	46,76
Sulawesi Barat	2018	5,12	3144,2	61,42	96,4	50,44
Sulawesi Barat	2019	5,43	1187,2	42,79	98,03	52,18
Sulawesi Barat	2020	4,99	252,9	19,17	87,8	54,41
Maluku	2016	5,02	11,4	75,21	88,14	49,84
Maluku	2017	5,13	52,3	73,63	91,35	52,64

Maluku	2018	5,12	1013,5	57,67	92,63	56,13
Maluku	2019	5,44	283,2	29,09	95,16	56,96
Maluku	2020	5,09	474,8	53,31	89,99	56,16
Maluku Utara	2016	5,25	8,8	76,52	89,99	47,08
Maluku Utara	2017	5,28	1150,6	64,73	94,23	49,53
Maluku Utara	2018	5,29	2276,3	58,43	95,24	53,55
Maluku Utara	2019	5,42	682,7	42,28	95,52	53,69
Maluku Utara	2020	5,42	662,1	66,57	89,22	54,88
Papua Barat	2016	4,84	10,6	64,29	86,39	56,93
Papua Barat	2017	4,91	59,2	66,33	90,1	59,88
Papua Barat	2018	5,18	50,9	44,54	92,31	65,08
Papua Barat	2019	5,32	380,2	49,73	94,36	66,49
Papua Barat	2020	5,01	1925,4	31,73	83,09	66,61
Papua	2016	3,33	220,5	66,79	50,9	34,24
Papua	2017	3,44	1217,9	58,23	55,81	36,31
Papua	2018	3,66	104,6	47,72	65,9	40,46
Papua	2019	3,22	567,7	34,93	72,37	38,5
Papua	2020	3,58	2722,2	48,61	43,14	40,44



LAMPIRAN 2

Data Penanaman Modal Dalam Negeri Setelah di Ln

Provinsi	Tahun	LN_PMDN
Aceh	2016	7,806330005
Aceh	2017	6,662877236
Aceh	2018	6,877296071
Aceh	2019	8,190603957
Aceh	2020	9,016889109
Sumatera Utara	2016	8,489657541
Sumatera Utara	2017	9,365941428
Sumatera Utara	2018	9,032624194
Sumatera Utara	2019	9,890858136
Sumatera Utara	2020	9,808599784
Sumatera Barat	2016	8,24159778
Sumatera Barat	2017	7,324489979
Sumatera Barat	2018	7,74474303
Sumatera Barat	2019	8,015195156
Sumatera Barat	2020	8,041155393
Riau	2016	8,796898534
Riau	2017	9,290056873
Riau	2018	9,111226969
Riau	2019	10,1770276
Riau	2020	10,43757452
Jambi	2016	8,264723811
Jambi	2017	8,008565151
Jambi	2018	7,964329556
Jambi	2019	8,397823898
Jambi	2020	8,16385553
Sumatera Selatan	2016	9,051825182
Sumatera Selatan	2017	9,011913823
Sumatera Selatan	2018	9,161129119
Sumatera Selatan	2019	9,736316643

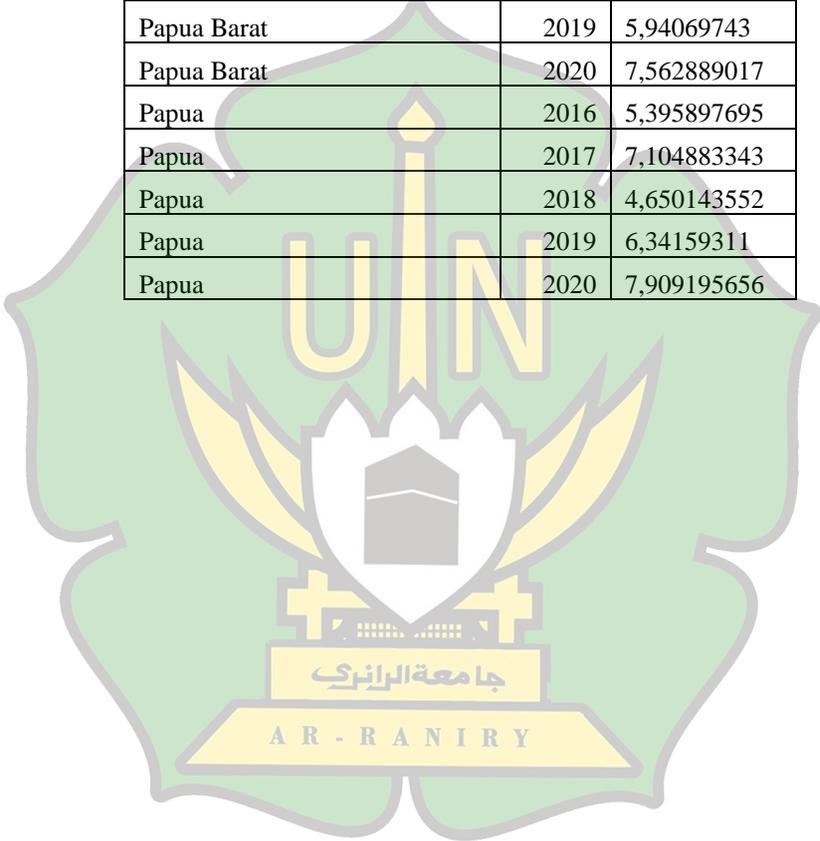
Sumatera Selatan	2020	9,669314651
Bengkulu	2016	6,855514167
Bengkulu	2017	5,692047218
Bengkulu	2018	8,497561749
Bengkulu	2019	8,604856023
Bengkulu	2020	8,594006073
Lampung	2016	8,704800753
Lampung	2017	8,855777482
Lampung	2018	9,41854895
Lampung	2019	7,795193759
Lampung	2020	8,870733227
Kep. Bangka Belitung	2016	7,697121317
Kep. Bangka Belitung	2017	7,458589767
Kep. Bangka Belitung	2018	8,043310047
Kep. Bangka Belitung	2019	7,977693707
Kep. Bangka Belitung	2020	7,530372693
Kep. Riau	2016	6,199494461
Kep. Riau	2017	7,242797923
Kep. Riau	2018	8,386172929
Kep. Riau	2019	8,640542926
Kep. Riau	2020	9,564442008
Dki Jakarta	2016	9,410575518
Dki Jakarta	2017	10,76346822
Dki Jakarta	2018	10,80156136
Dki Jakarta	2019	11,03641753
Dki Jakarta	2020	10,66790135
Jawa Barat	2016	10,32088782
Jawa Barat	2017	10,55556792
Jawa Barat	2018	10,65202687
Jawa Barat	2019	10,80535882
Jawa Barat	2020	10,84740318
Jawa Tengah	2016	10,08873815

Jawa Tengah	2017	9,896765007
Jawa Tengah	2018	10,22102814
Jawa Tengah	2019	9,833853404
Jawa Tengah	2020	10,32895461
Di Yogyakarta	2016	6,854987213
Di Yogyakarta	2017	5,685618504
Di Yogyakarta	2018	8,721227315
Di Yogyakarta	2019	8,748114418
Di Yogyakarta	2020	7,894839926
Jawa Timur	2016	10,74357951
Jawa Timur	2017	10,71540617
Jawa Timur	2018	10,41430618
Jawa Timur	2019	10,7244275
Jawa Timur	2020	10,92702781
Banten	2016	9,427570473
Banten	2017	9,625221014
Banten	2018	9,832936325
Banten	2019	9,938294694
Banten	2020	10,34643147
Bali	2016	6,178566327
Bali	2017	6,384350873
Bali	2018	7,345235717
Bali	2019	8,908315938
Bali	2020	8,600191527
Nusa Tenggara Barat	2016	7,202512265
Nusa Tenggara Barat	2017	8,596651113
Nusa Tenggara Barat	2018	8,327266791
Nusa Tenggara Barat	2019	8,165932137
Nusa Tenggara Barat	2020	8,792154699
Nusa Tenggara Timur	2016	6,711983674
Nusa Tenggara Timur	2017	6,986474034
Nusa Tenggara Timur	2018	8,353756194

Nusa Tenggara Timur	2019	8,230204212
Nusa Tenggara Timur	2020	8,015822726
Kalimantan Barat	2016	9,106700597
Kalimantan Barat	2017	9,423910241
Kalimantan Barat	2018	8,793521048
Kalimantan Barat	2019	8,948858718
Kalimantan Barat	2020	9,133081286
Kalimantan Tengah	2016	9,009337399
Kalimantan Tengah	2017	8,018888848
Kalimantan Tengah	2018	9,479726082
Kalimantan Tengah	2019	9,058575178
Kalimantan Tengah	2020	8,218787156
Kalimantan Selatan	2016	8,726318951
Kalimantan Selatan	2017	8,00031596
Kalimantan Selatan	2018	9,207857292
Kalimantan Selatan	2019	9,216421842
Kalimantan Selatan	2020	8,363179169
Kalimantan Timur	2016	8,837114935
Kalimantan Timur	2017	9,30384893
Kalimantan Timur	2018	10,16361856
Kalimantan Timur	2019	9,996613531
Kalimantan Timur	2020	10,16331013
Kalimantan Utara	2016	8,115431218
Kalimantan Utara	2017	6,749111186
Kalimantan Utara	2018	7,212884265
Kalimantan Utara	2019	8,389564344
Kalimantan Utara	2020	7,712085989
Sulawesi Utara	2016	8,531017198
Sulawesi Utara	2017	7,305322615
Sulawesi Utara	2018	8,371033829
Sulawesi Utara	2019	9,019131439
Sulawesi Utara	2020	8,008232494

Sulawesi Tengah	2016	6,985826814
Sulawesi Tengah	2017	7,565119829
Sulawesi Tengah	2018	9,046514707
Sulawesi Tengah	2019	8,398139349
Sulawesi Tengah	2020	8,568133423
Sulawesi Selatan	2016	8,112108011
Sulawesi Selatan	2017	7,585484207
Sulawesi Selatan	2018	8,094347919
Sulawesi Selatan	2019	8,643402845
Sulawesi Selatan	2020	9,120634459
Sulawesi Tenggara	2016	7,492314519
Sulawesi Tenggara	2017	8,054744948
Sulawesi Tenggara	2018	7,379881654
Sulawesi Tenggara	2019	8,249862615
Sulawesi Tenggara	2020	7,960567927
Gorontalo	2016	7,697348358
Gorontalo	2017	6,789422092
Gorontalo	2018	7,888634531
Gorontalo	2019	6,738626316
Gorontalo	2020	6,527372951
Sulawesi Barat	2016	4,432006567
Sulawesi Barat	2017	6,492542819
Sulawesi Barat	2018	8,053314765
Sulawesi Barat	2019	7,079352872
Sulawesi Barat	2020	5,532994154
Maluku	2016	2,433613355
Maluku	2017	3,956996371
Maluku	2018	6,921164966
Maluku	2019	5,646153362
Maluku	2020	6,162893663
Maluku Utara	2016	2,174751721
Maluku Utara	2017	7,048038824

Maluku Utara	2018	7,730306597
Maluku Utara	2019	6,526055524
Maluku Utara	2020	6,495416602
Papua Barat	2016	2,360854001
Papua Barat	2017	4,080921542
Papua Barat	2018	3,929862924
Papua Barat	2019	5,94069743
Papua Barat	2020	7,562889017
Papua	2016	5,395897695
Papua	2017	7,104883343
Papua	2018	4,650143552
Papua	2019	6,34159311
Papua	2020	7,909195656

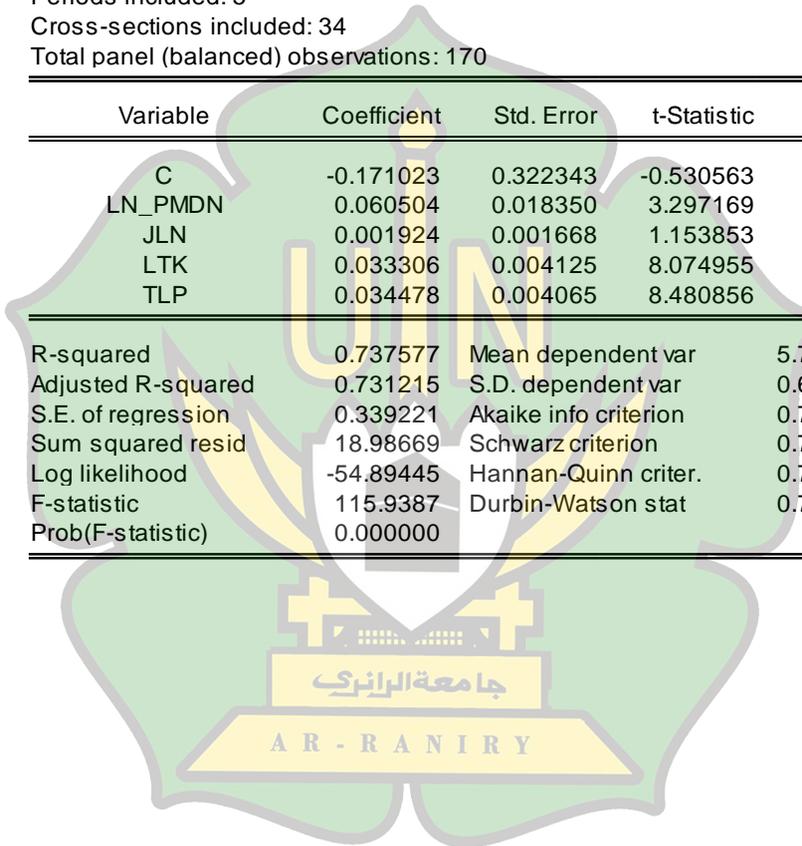


LAMPIRAN 3

Hasi Uji *Commont Effect Model*

Dependent Variable: PEI
 Method: Panel Least Squares
 Date: 12/08/22 Time: 18:47
 Sample: 2016 2020
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 34
 Total panel (balanced) observations: 170

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.171023	0.322343	-0.530563	0.5964
LN_PMDN	0.060504	0.018350	3.297169	0.0012
JLN	0.001924	0.001668	1.153853	0.2502
LTK	0.033306	0.004125	8.074955	0.0000
TLP	0.034478	0.004065	8.480856	0.0000
R-squared	0.737577	Mean dependent var		5.700353
Adjusted R-squared	0.731215	S.D. dependent var		0.654305
S.E. of regression	0.339221	Akaike info criterion		0.704641
Sum squared resid	18.98669	Schwarz criterion		0.796870
Log likelihood	-54.89445	Hannan-Quinn criter.		0.742066
F-statistic	115.9387	Durbin-Watson stat		0.712465
Prob(F-statistic)	0.000000			



LAMPIRAN 4

Hasil Uji *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: PEI
 Method: Panel Least Squares
 Date: 12/08/22 Time: 18:47
 Sample: 2016 2020
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 34
 Total panel (balanced) observations: 170

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.829101	0.596766	4.740720	0.0000
LN_PMDN	-0.013085	0.019028	-0.687662	0.4929
JLN	0.002083	0.001092	1.907907	0.0586
LTK	0.012165	0.005476	2.221324	0.0280
TLP	0.028151	0.006973	4.036969	0.0001
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.938751	Mean dependent var	5.700353	
Adjusted R-squared	0.921582	S.D. dependent var	0.654305	
S.E. of regression	0.183226	Akaike info criterion	-0.362131	
Sum squared resid	4.431472	Schwarz criterion	0.338812	
Log likelihood	68.78111	Hannan-Quinn criter.	-0.077696	
F-statistic	54.67909	Durbin-Watson stat	2.624496	
Prob(F-statistic)	0.000000			

LAMPIRAN 5

Hasi Uji *Random Effect Model*

Dependent Variable: PEI
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 12/08/22 Time: 18:48
 Sample: 2016 2020
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 34
 Total panel (balanced) observations: 170
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.260471	0.423990	2.972878	0.0034
LN_PMDN	0.002032	0.016947	0.119890	0.9047
JLN	0.002269	0.001059	2.143273	0.0336
LTK	0.022762	0.004527	5.028033	0.0000
TLP	0.035103	0.005174	6.784561	0.0000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.285565	0.7084
Idiosyncratic random			0.183226	0.2916
Weighted Statistics				
R-squared	0.419201	Mean dependent var		1.572236
Adjusted R-squared	0.405121	S.D. dependent var		0.248770
S.E. of regression	0.191872	Sum squared resid		6.074458
F-statistic	29.77288	Durbin-Watson stat		1.946562
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.684539	Mean dependent var		5.700353
Sum squared resid	22.82402	Durbin-Watson stat		0.518064

LAMPIRAN 6

Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	13.138047	(33,132)	0.0000
Cross-section Chi-square	247.351127	33	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: PEI

Method: Panel Least Squares

Date: 12/08/22 Time: 18:49

Sample: 2016 2020

Periods included: 5

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 170

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.171023	0.322343	-0.530563	0.5964
LN_PMDN	0.060504	0.018350	3.297169	0.0012
JLN	0.001924	0.001668	1.153853	0.2502
LTK	0.033306	0.004125	8.074955	0.0000
TLP	0.034478	0.004065	8.480856	0.0000

R-squared	0.737577	Mean dependent var	5.700353
Adjusted R-squared	0.731215	S.D. dependent var	0.654305
S.E. of regression	0.339221	Akaike info criterion	0.704641
Sum squared resid	18.98669	Schwarz criterion	0.796870
Log likelihood	-54.89445	Hannan-Quinn criter.	0.742066
F-statistic	115.9387	Durbin-Watson stat	0.712465
Prob(F-statistic)	0.000000		

LAMPIRAN 7

Hasil Uji *Hausman*

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	19.939543	4	0.0005

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LN_PMDN	-0.013085	0.002032	0.000075	0.0806
JLN	0.002083	0.002269	0.000000	0.4855
LTK	0.012165	0.022762	0.000009	0.0006
TLP	0.028151	0.035103	0.000022	0.1370

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: PEI
Method: Panel Least Squares
Date: 12/08/22 Time: 18:49
Sample: 2016 2020
Periods included: 5
Cross-sections included: 34
Total panel (balanced) observations: 170

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.829101	0.596766	4.740720	0.0000
LN_PMDN	-0.013085	0.019028	-0.687662	0.4929
JLN	0.002083	0.001092	1.907907	0.0586
LTK	0.012165	0.005476	2.221324	0.0280
TLP	0.028151	0.006973	4.036969	0.0001

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.938751	Mean dependent var	5.700353
Adjusted R-squared	0.921582	S.D. dependent var	0.654305
S.E. of regression	0.183226	Akaike info criterion	-0.362131
Sum squared resid	4.431472	Schwarz criterion	0.338812
Log likelihood	68.78111	Hannan-Quinn criter.	-0.077696
F-statistic	54.67909	Durbin-Watson stat	2.624496
Prob(F-statistic)	0.000000		